

No. **132** Desember 2016 - Januari 2017

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**ANAK MUDA MAKASSAR
MENYULAP JELANTAH
MENJADI BIODIESEL**

**KEDAULATAN PANGAN
DI SALASSAE**

**PENYELARASAN TPB/SDGS
DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL
2015-2019**

**SATU PETA UNTUK
SATU TUJUAN :
MAJU DAN SEJAHTERA !**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X





BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
VICTORIA NGANTUNG
SYAIFULLAH

Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Website **ADITYA RAKHMAT**

Smart Practices & Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database Kontak **A. RINI INDAYANI**

Design & layout Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Desember 2016 - Januari 2017

No. 132

1 Inspirasi BaKTI
**Anak Muda Makassar Menyulap
Jelantah Menjadi Biodiesel**
Oleh **SUMARNI ARIANTO**

5 MCA Indonesia
**Makmur dan Cerdas
di Sekolah Lapang**
Oleh **SYAIFULLAH**

9 Pebisnis Tuna Loin
dari Fandoi Biak
Oleh **KAMARUDDIN AZIS**

13 Penyelarasan TPB/SDGs dengan
**Rencana Pembangunan Nasional
2015-2019**

19 UNICEF
**Pemkab Gowa dan Pemkot Makassar
Gelar Konsultasi Publik PPKAI**
Oleh **RAHMAN RAMLAN**

21 MCA Indonesia
**Satu Peta untuk Satu Tujuan :
Maju dan Sejahtera !**
Oleh **SYAIFULLAH**

25 Praktik Cerdas Pembangunan
NTT 2016 WVI
• **Credit Union Letekonda Bebaskan
Warga dari Rentenir**
• **Kursus Potensi Diri Antar Remaja
Jadi Agen Perubahan**

29 UNICEF
**Tidak Selalu Menunggu Uluran
Tangan Negara**
Kabar dari Pokja AMPL Sulawesi Selatan
Oleh **RAHMAN RAMLAN**

33 Praktik Cerdas dari Bulukumba
Kedaulatan Pangan di Salassae

37 5 Panduan menggunakan
Media Sosial
Oleh **MANSYUR RAHIM**

39 Update Batukarininfo

40 Kegiatan di BaKTI

41 Info Buku

 Foto Cover : Yusuf Ahmad

ANAK MUDA
YANG MENYULAP
MINYAK JELANTAH
MENJADI
BAHAN BAKAR DIESEL
LEWAT WIRAUSAHA SOSIAL

KANTOR BaKTI
28 OKTOBER

Anak Muda Makassar Menyulap Jelantah menjadi Biodiesel

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Cuaca kota Makassar hari itu kurang bersahabat, langit mendung disertai hujan yang lumayan deras. Jam menunjukkan pukul 4, suasana hampir serupa senja namun peserta kegiatan Inspirasi BaKTI belum banyak yang datang. Menurut kabar dari beberapa peserta yang sudah lebih dulu hadir, beberapa ruas jalan utama Makassar macet

parah. Hari itu memang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dan ada beberapa demonstrasi.

Tak lama kemudian 4 orang pemuda yang saya nantikan muncul. Saya memperkenalkan diri sebagai orang yang beberapa hari belakangan ini berkomunikasi melalui WA untuk mengatur dan berkoordinasi mengenai kegiatan sore ini dengannya. Berkacamata,

Saat ini jumlah permintaan solar di pelabuhan Paotere sebesar 21 ton, sementara pemerintah hanya sanggup menyediakan 16 ton. Kekurangan 5 ton ini kemudian coba ditutupi oleh GEN Oil.

dengan potongan rambut cepak, wajah tirus dan mengenakan kemeja biru tua lengan pendek, ia menyebutkan namanya, Hilmy

Hilmy yang bernama lengkap Andi Hilmy Mutawwakil sore itu tidak datang sendiri, ia bersama 3 orang temannya. Salah satunya adalah Achmad Fauzy Ashari atau disapa Ozi. Hilmi dan Ozi mewakili GEN Oil (Garuda Energi Nusantara) berbagi kisah mereka dalam menyulap minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel. Bahkan ide mereka ini berhasil menyabet juara satu pada event Ideafest 2016 mengalahkan 1500 peserta.

Apa yang telah dikerjakan Hilmy dan kawan-kawan sehingga menjuarai event tersebut? Hilmy memulai ide keren menyulap minyak jelantah menjadi biodiesel dengan melakukan riset sederhana tentang sumber energi lain selain energi fosil pada tahun 2011. Setelah melakukan berbagai percobaan dan analisa Hilmy berfokus pada tiga bahan untuk diubah menjadi biodiesel, yaitu air, plastik, dan minyak jelantah.

Setelah sering kali ditolak oleh berbagai pihak saat berupaya mengumpulkan dana riset, Hilmy dan teman-temannya mengumpulkan uang saku mereka dan meminjam sebagian peralatan laboratorium sekolah agar dapat tetap melakukan riset.

Suatu hari saat menemani ibunya yang hendak membeli ikan di pasar, Hilmy melihat penjual gorengan menggunakan minyak goreng yang sudah menghitam. Ia membayangkan betapa berbahayanya minyak itu terhadap kesehatan tubuh. Saat itu, ibunya yang hendak membeli ikan, kecewa karena jumlah ikan sangat terbatas, baik jumlah maupun jenisnya. “Kurang nelayan yang melaut karena harga bahan bakar solar yang digunakan untuk mesin perahu sedang mahal”, jelas kebanyakan penjual ikan saat itu.

Dari kunjungan Hilmy ke pasar ia menemukan 3 masalah utama yakni, penggunaan minyak jelantah yang tidak baik buat kesehatan, pasokan ikan yang terbatas karena nelayan semakin sulit melaut akibat terbatas bahan bakar dan masalah sosial berupa preman yang seringkali dianggap sampah masyarakat.

Hilmy dan timnya kemudian melanjutkan penelitian. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah pertukaran minyak goreng bekas di Makassar adalah 17.600 liter per hari atau setara dengan 2 truk tangki Pertamina. Jumlah yang banyak ini kemudian malah disalahgunakan dengan dijual ke pasar tradisional sebagai minyak curah atau dijual ke penjual gorengan dengan dalih efisiensi pengeluaran.

Kadar lemak tak jenuh dan Vitamin A, D, E, dan K yang terdapat di minyak semakin lama akan semakin berkurang. Dan yang dapat menyebabkan penyakit seperti jantung koroner dan stroke. Beberapa penelitian menyatakan bahwa minyak jelantah mengandung senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan penyakit kanker.

Mengenai harga bahan bakar solar yang dianggap mahal, rata-rata per hari nelayan harus mengeluarkan uang sebanyak 700 ribu rupiah untuk membeli 100 liter solar. Dalam sebulan, rata-rata pengeluaran untuk bahan bakar saja mencapai 21 juta rupiah! Ini pun jika pasokan bahan bakar tersebut lancar. Sayangnya seringkali distribusi solar dari Pertamina tidak cukup sehingga memaksa nelayan membeli ke penyalur tidak resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Hilmy dan teman-temannya juga menemukan fakta bahwa baik preman maupun mantan preman sendiri sulit menemukan pekerjaan. Jarang ada yang mau



“

Kami tidak ingin tahun 2025 kita harus impor ikan dan minyak karena tidak ada lagi yang mau jadi nelayan. Inilah yang menjadi komitmen kami di GEN OIL untuk terus berkarya.

Andi Hilmy Mutawwakil
GEN Oil

mempekerjakan mereka mengingat masa lalu mereka. Akibatnya mereka cenderung kembali melakukan tindak kejahatan, masuk penjara, keluar dan kembali lagi sehingga angka kriminalitas tidak berkurang.

Hilmykemudian memutuskan untuk fokus pada pengembangan biodiesel dengan

Hilmy sedang menjelaskan proses pembuatan minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel yang telah disosialisasikan pada kampung nelayan Paotere-Makassar .

Foto : Yayasan BaKTI/Sumarni Arianto

memanfaatkan minyak jelantah. Biodiesel adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarukai seperti minyak sayur atau lemak hewan.

Minyak jelantah mengandung asam lemak bebas yang cukup tinggi. Ini menyulitkan pada saat akan diproses menjadi biodiesel, oleh sebab itu perlu untuk dikurangi kandungan lemak bebasnya dengan proses esterifikasi. GEN Oil melakukan banyak uji coba, menghasilkan banyak catatan pembelajaran dan karya tulis ilmiah dalam upayanya menjadikan minyak jelantah sebagai biodiesel.

Karya tulis hasil riset mereka lalu dibuat menjadi proposal untuk mengajukan pinjaman

ke bank. Namun karena masih baru, Hilmy yang masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan antropologi di Universitas Negeri Makassar saat itu gagal mendapat pinjaman bank. Proposalnya pun sudah pernah diajukan ke beberapa instansi namun hasilnya nihil.

Saat bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi, masih dalam upaya mengembangkan usaha biodiesel, Hilmy bertemu Achmad Fauzy Ashari atau yang akrab disapa Ozy. Bersama Ozy dan dua rekan lainnya ia mulai mengembangkan usaha pengolahan minyak jelantahnya dengan modal awal hasil patungan dan membentuk GEN (Garuda Energi Nusantara) Oil.

“Saya buat prototype yang bisa produksi 30 liter perhari dan kita coba jalan selama 2 bulan. Ternyata berjalan dengan baik. Akhirnya setelah itu kami survey berapa tempat yang menghasilkan minyak jelantah di Makassar, ternyata potensinya besar!” kata Hilmy. Di Kawasan Industri Makassar, 1 pabrik dapat menghasilkan 4-8 ton minyak jelantah per hari. Di kawasan yang sama, terdapat 10 industri makanan yang menghasilkan minyak jelantah. Potensi minyak jelantah yang bisa dihasilkan adalah sekitar 17.6 ton setiap harinya. “Daripada disalahkan lebih baik diolah menjadi biodiesel!”, imbuh Hilmy.

Merintis usaha biodiesel dari minyak jelantah

Menyadari potensi usaha yang besar, Hilmy dan teman-temannya kemudian membangun pabrik untuk mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel. Mereka mengajak preman untuk menjadi agen pengumpul minyak jelantah. Sebelumnya, para preman edukasi tentang bahaya minyak jelantah dan diasah rasa kepeduliannya terhadap masyarakat sembari memberi keuntungan yang layak bagi mereka.

Sebanyak 20 mantan preman setuju menjadi agen pengumpul minyak jelantah. Mereka diberi modal pinjaman untuk memudahkan

dalam mengumpulkan minyak jelantah. Sampai hari ini mereka mampu mendistribusikan minyak jelantah sebanyak 30 ton setiap bulan. Dengan keuntungan 5 ratus hingga seribu rupiah perliter, para mantan preman ini mendapatkan penghasilan 10-30 jutarupiah setiap bulan.

Saat ini jumlah permintaan solar di pelabuhan Paotere sebesar 21 ton, sementara pemerintah hanya sanggup menyediakan 16 ton. Kekurangan 5 ton ini kemudian coba ditutupi oleh GEN Oil. Sekarang, dari total produksi harian 2.000 liter perhari, Gen Oil telah mampu membantu 30 kelompok nelayan di kawasan Paotere.

Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan suplai BBM, tapi biodiesel GEN Oil juga mampu membantu mengefisienkan beban pengeluaran nelayan kecil. Jika sebelumnya setiap bulan nelayan harus mengeluarkan uang 21 juta rupiah untuk solar, dengan efisiensi 20% karena penggunaan biodiesel artinya ada penghematan 4,2 juta rupiah per bulan untuk setiap nelayan yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup mereka. Bayangkan berapa peningkatan produksi yang bisa dihasilkan dan dampak yang bisa dirasakan jika seandainya regulasi mendukung mereka.

“Saat ini yang menjadi prioritas kami adalah bagaimana membantu nelayan sebanyak-banyaknya. Tahun 2003 hingga 2016 awalnya kita punya 1.6 juta nelayan namun hari ini tersisa 850.000 nelayan saja, 50% sudah beralih profesi. Kami tidak ingin tahun 2025 kita harus impor ikan dan minyak karena tidak ada lagi yang mau jadi nelayan. Inilah yang menjadi komitmen kami di GEN OIL untuk terus berkarya” tutup Hilmy. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi mengenai Program Inspirasi BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id, informasi tentang Gen Oil dapat menghubungi Andi Hilmy Mutawakil melalui email: genoil007@gmail.com



MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Makmur dan Cerdas di Sekolah Lapang

Oleh **SYAIFULLAH**

Siang itu di sebuah bangunan di antara pepohonan di tepi sawah dalam kawasan Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Hulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Tanah basah selepas hujan, lumpur di mana-mana, membuat orang sulit berjalan. Bangunan itu dari kayu, serupa rumah panggung dengan bagian bawah yang lapang. Sebuah balai-balai kayu menempel ke dua tiang. Belasan orang duduk melingkar di atas

papan di bawah rumah panggung itu. Sebagian besar adalah perempuan, tua dan muda.

Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan muda bernama Anis Purwaty. Perempuan berkulit cokelat dan berhijab merah muda itu tampak jadi pusat perhatian. Semua yang hadir menghadapkan mukanya ke Anis-demikian dia biasa disapa.

Anis adalah salah satu personil dari Yayasan Mitra Aksi, Jambi. Hari itu dia sedang berbagi tentang agency hayati. Agency hayati adalah



Melihat bakal sekolah lapang. Foto : Yayasan BaKTI/Syaifullah

sebuah mekanisme kontrol terhadap hama penyakit tanaman atau organisme pengganggu dengan memelihara musuh alamiahnya. Hari itu Anis sedang membagikan teknik mengembangbiakkan trikoderma (*trichoderma sp*), sejenis cendawan atau fungi yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman dan melawan penyakit tanaman.

Apa yang dilakukan oleh Anis adalah bagian dari kegiatan Yayasan Mitra Aksi, Jambi. Yayasan yang sudah berdiri sejak 5 Februari 2000 salah satu fokus kegiatannya adalah pada pendampingan petani, khususnya di lahan gambut.

Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan adalah membuat sekolah lapang. Sebuah kegiatan di lapangan yang dilakukan dengan melibatkan petani dampingan. Sekolah lapang bukan hanya sebuah kegiatan belajar teori, tapi lebih banyak kepada praktik langsung di lapangan

Di sekolah lapang, petani didampingi untuk mengembangkan kapasitas mereka. Mulai dari melakukan riset ekologi sederhana seperti mengecek tingkat kesuburan tanah atau

mengecek kondisi tanah, mengecek kondisi air yang digunakan, mencari tahu spesies yang adaptif dan cocok untuk lahan mereka sampai mengembangkan pupuk atau anti hama yang alamiah.

“Kadang-kadang petani tidak sadar kalau tanah mereka sudah mengalami perubahan. Apa yang mereka lakukan dua puluh tahun lalu mungkin tidak bisa lagi dilakukan sekarang karena kondisinya sudah berubah,” kata Nilawaty, Direktur Yayasan Mitra Aksi yang ditemui di kantornya di Muaro Jambi.

Dengan sekolah lapang, petani diajak untuk mencari tahu apa akar masalah mereka sebenarnya. Selama ini petani kadang hanya tahu kalau produksi mereka menurun, tapi mereka tidak tahu apa penyebabnya. Apakah tanah yang berubah? Air yang tidak cocok? Jenis tanaman yang tidak sesuai? Penggunaan pestisida yang terlalu banyak? Atau mungkin masalah lainnya?

Riset-riset yang diajarkan kepada para petani dilakukan dengan sederhana dan memanfaatkan benda-benda yang gampang ditemukan. Salah satunya adalah ketika

melakukan riset ekologi tanah, petani hanya diajarkan cara melakukan riset ekologi tanah dengan menggunakan plastik biasa. Dengan cara sederhana dan alat sederhana pula petani bisa tahu dengan pasti kondisi tanahnya.

Menularkan Pengetahuan

Sekolah lapang yang digelar Yayasan Mitra Aksi di tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Total ada 14 desa yang berada di ketiga kabupaten tersebut.

Ada dua macam sekolah lapang: sekolah lapang untuk pertanian pangan seperti padi dan sekolah lapang untuk *agroforestry* seperti sayur-sayuran atau tanaman lain yang sesuai dengan potensi lokal. Pemilihan tanaman ini dilakukan dengan melibatkan petani dan melalui proses riset sederhana untuk tahu apa jenis tanaman yang cocok di lahan mereka. Pemilihan benih diutamakan benih lokal yang sudah terbukti punya daya tahan lebih tinggi daripada benih dari luar.

Karena namanya sekolah lapang, maka tentu saja semua proses belajar mengajar dilakukan di lapangan, bukan di dalam ruangan. Di satu desa, Yayasan Mitra Aksi akan memilih satu lahan yang dijadikan *demonstration plot* atau demplot. Di lahan inilah semua proses belajar mengajar dilakukan langsung oleh petani.

“Untuk satu sekolah lapang, kita menargetkan minimal 50 peserta dengan target perempuan minimal 30%” kata Nilawaty. Jumlah 50 orang itu diambil dari anggota kelompok-kelompok tani dalam sebuah desa.

Sebelum memulai sekolah lapang, Yayasan Mitra Aksi akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga desa dan perangkat desa, musyawarah itu akan menyepakati siapa saja wakil kelompok tani yang akan menjadi anggota sekolah lapang dan di mana lokasi demplot sekolah lapang tersebut. Pelibatan ini disertai dengan surat keputusan dari pemerintah desa.

Para peserta sekolah lapang diharapkan nantinya akan menularkan pengetahuan mereka ke teman-teman petani lainnya di dalam kelompok taninya.

Untuk mengubah pola pikir petani, khususnya dalam hal pertanian organik, Yayasan Mitra Aksi langsung memberikan contoh. Terkadang mereka dengan sengaja membandingkan dua demplot, satu dengan

menggunakan bahan-bahan kimia dan satu dengan menggunakan bahan-bahan organik.

Setelah masa panen petani akan melihat sendiri mana yang hasilnya lebih maksimal dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Dari bukti nyata itu maka perlahan pola pikir petani yang sebelumnya lebih memilih bahan-bahan kimia yang dirasa lebih efisien, akan berpindah menggunakan bahan-bahan organik.

Dengan lancar Trasno menceritakan proses pendampingan petani untuk membuat pupuk organik dengan teknik sederhana, juga beberapa teknik riset untuk mengetahui kondisi tanah. Untuk mendukung kegiatan sekolah lapang, Trasno dan semua anggota Yayasan Mitra Aksi tinggal di lapangan. Mereka tinggal langsung bersama petani sehingga bisa mendampingi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Pengujian Melewati Dua Musim Panen

Beberapa bedengan berderet rapi di atas tanah yang basah. Bersama Nilawaty dan dua pendamping lapangan dari Yayasan Mitra Aksi, kami diajak melihat langsung sekolah lapang di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Lahan seluas lebih dari 1 hektar itu adalah milik Pungut Heri Susanto, salah satu warga yang menyediakan lahannya menjadi lokasi sekolah lapang. Selama ini lahan milik Pungut Heri Susanto sudah mulai mengalami penurunan produksi. Beberapa tanaman yang dikembangkannya sudah tidak subur lagi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketika dikunjungi di bulan Desember 2016, lahan milik Pungut Heri Susanto memang masih kosong. Lahan tersebut baru saja dibersihkan dan siap untuk ditanami. Rencananya di atas lahan itu akan ditanam beberapa tanaman hortikultura seperti jagung, cabai dan kacang panjang. Proses penelitian ekologi tanah dan pemilihan benih sudah dilewati, saatnya menanam.

Lahan Pungut Heri Susanto bukan hanya akan dijadikan demplot yang diisi tanaman, tapi juga beberapa kolam ikan. Kolam-kolam ikan itu rencananya akan diisi dengan benih ikan patin dan gurami.

Untuk satu demplot, pengujiannya minimal harus melewati dua musim atau sebaiknya tiga musim. Dari pengujian itu bisa ditemukan apa

saja yang harus diperbaiki atau apa saja kekurangannya. Kalaupun terjadi kesalahan, risikonya lebih kecil karena berada di lokasi yang juga tidak seberapa besar. Setelah masa uji tersebut, barulah metode yang ditemukan akan disebarkan ke lahan yang lebih luas.

Bermula dari Kesehatan Reproduksi

Apa yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Aksi saat ini sejatinya adalah buah dari perjalanan panjang. Di awal pembentukannya, Yayasan Mitra Aksi malah fokus pada kesehatan reproduksi yang lingkup kerjanya ada di beberapa daerah Indonesia. Saat itu mereka mendampingi para bidan desa yang berasal dari desa-desa terpencil.

“Dari proses perjalanan itu muncul pertanyaan; fasilitas dan layanan kesehatan semakin membaik, tapi kenapa tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi? Dari situ kami sadar bahwa masalah utama ada di sisi asupan gizi,” kata Drs. Hambali S, Sos, salah satu anggota Badan Pembina Yayasan Mitra Aksi. Kesadaran itu kemudian memunculkan ide untuk memperbaiki hal paling mendasar bagi kesehatan yaitu asupan makanan bergizi. Perbaikan asupan itupun tidak langsung berbicara tentang tanaman, tapi dimulai dari pengetahuan dan teknologi tentang tanah tempat tanaman itu hidup. Petani harus tahu betul tentang karakter tanahnya, apalagi tanah di lahan gambut yang punya tingkat kesulitan lebih tinggi.

Menurut Drs. Hambali S, Sos, selama ini petani yang bertani gambut banyak yang tidak mengerti karakter lahan mereka. Selama bertahun-tahun mereka hanya tahu bertani atau bercocoktanam di atas lahan gambut, tapi mereka tidak sadar kalau ada yang berubah dari lahan gambut.

Bila dulu mereka bisa membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut dan tidak ada masalah, itu karena dulu ketinggian air tanah gambut masih tinggi. Sekarang, berbagai



Belajar agensi hayati di sekolah lapang Foto : Yayasan BaKTI/Syaifullah

faktor telah menyebabkan air tanah di lahan gambut semakin menyusut. Akibatnya, api sekecil apapun bisa menyebabkan kebakaran yang luas.

Selama bertahun-tahun, Yayasan Mitra Aksi berfokus pada berbagai metode pertanian berkelanjutan khususnya di lahan gambut. Dari riset ekologi, pemilihan benih yang cocok, menciptakan pupuk dan pestisida organik dan sebagainya. Semua pengalaman itu lalu dirangkum ke dalam beberapa metode yang disebut metode riset aksi. Salah satu bagiannya adalah sekolah lapang yang terus dikembangkan sampai saat ini.

Sesuai dengan namanya, sekolah lapang memang menjadi sebuah sekolah yang sangat pas untuk para petani khususnya yang bertani di lahan gambut. Para petani bukan hanya diajarkan cara bertani, tapi juga ditambah wawasan dan pengetahuannya. Pada akhirnya mereka bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga meningkatkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang benar dan sesuai dengan lahan mereka. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA - Indonesia, hubungi info@bakti.or.id



Pebisnis Tuna Loin dari Fandoi Biak

Oleh **KAMARUDDIN AZIS**



Ilustrasi | FG

“

Banyak ikan di perairan Biak, hanya saja, sejak pelarangan rumpon, ikan-ikan akan semakin susah ditangkap. Apalagi nelayan setempat masih menggunakan perahu kecil dan tak berani melaut jauh.

Yusuf - Pebisnis Tuna Loin

Gerimis baru saja berlalu di Kampung Fandoi, Kota Biak, Papua. Dua ekor babi lalu lalang di ruas jalan kampung, persis di lintasan sepasang anak muda yang menjunjung ember plastik hitam berisi tongkol. Dekat dengan itu, di atas meja kayu milik Haji Razak tergeletak tuna seberat 53 kilogram. Tuna siap di-loin, pisau di tangan sang Haji siap beraksi.

Fandoi adalah kampung nelayan di Biak, Papua. Biak Numfor adalah salah satu lokasi dari 15 lokasi SKPT yang telah dipilih oleh Pemerintah untuk menjadi sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di tahun 2016.

Tuna loin adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku tuna segar yang mengalami beragam perlakuan. Di antaranya, penerimaan ikan tuna, penimbangan, penyiangan, pencucian tahap satu, penyimpanan sementara atau pendinginan, pencucian tahap dua, pemotongan kepala, pembuatan loin, pembuangan daging hitam, pembuangan kulit, perapihan, pengemasan, pengiriman hingga penyimpanan di *cold storage* hingga masuk pasar.

“Di Fandoi, Haji Razak ini merupakan salah satu pengusaha tuna loin yang dapat dijadikan mitra oleh Pemerintah,” tegas Andiu yang berkantor di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Fandoi, atau di seberang kantor dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor.

Selain Razak, ada pula Yusuf, seorang pedagang berdarah Bugis yang berpengalaman dan telah bertahun-tahun tinggal di Kota Biak. Mereka mengelola usaha yang sama, tuna loin.

Di kolong rumah Yusuf, terdapat meja operasi tuna, *coldbox* dan plastik untuk pengepakan ikan. Dari pintu belakang rumah Yusuf terkuak pemandangan pantai dan perahu-perahu yang sedang sandar.

“Yang ini, beratnya 57 kilogram,” jawab Haji Yusuf saat ditanya bobot ikan yang sedang dikerjakan oleh karyawan bernama Amiruddin



Ikan-ikan Tuna yang telah diolah disimpan dalam cold box sebelum dilakukan proses pengepakan.

Foto : Kamaruddin Azis

sore itu. Karyawan yang mengaku belajar melakukan loin di Makassar.

Yusuf membeli ikan dari nelayan anggotanya yang beroperasi di Perairan Biak Barat. Di tangan karyawannya ikan diolah, dipotong siripnya, dipotong kepalanya hingga diiris, dikepak, dibungkus dan didinginkan. Modal usahanya adalah hasil tabungan dan pemupukan laba dari usaha perikanan yang dirintisnya bertahun-tahun.

“Hitungannya Rp. 20 ribu perkilo jadi kalau ikan seberat 57 kilogram dihargai kurang lebih satu juta,” ungkap Yusuf yang merupakan pengusaha ikan asal Bantimutung Maros, Sulawesi Selatan.

Yusuf datang pertama kali ke Biak tahun 1980. Dia mengaku ada dua puluhan anggota nelayannya, termasuk nelayan asli Papua yang selama ini menjadi sumber ikannya. Dia membeli ikan hasil tangkapan nelayan setempat. Di belakang rumahnya yang tak lebih 5 x 10 meter tersebut terparkir belasan perahu. Ikan loin Yusuf dikirim lewat bandara Kaisepo-Biak. Di Makassar sudah ada yang tunggu.

Yusuf mengatakan lokasi-lokasi yang menjadi sumber ikan tuna sesuai pengalamannya, selain perairan Biak adalah Mamuju di Sulawesi Barat, Laut Banda, perairan Biak hingga Tual di Maluku Tenggara. Yusuf

tahu bahwa ikan-ikan olahannya akan dites kelayakannya di Makassar. Sebagai 'hazard test' sebagaimana

“Banyak ikan di perairan Biak, hanya saja, sejak pelarangan rumpon, ikan-ikan akan semakin susah ditangkap. Apalagi nelayan setempat masih menggunakan perahu kecil dan tak berani melaut jauh,” kata Yusuf.

Sebagai bisnis yang memanfaatkan jasa layanan udara, sertifikasi ikan yang ditempuh Razak dan Yusuf adalah dengan taat mengirimkan sampel ikan ke kantor balai karantina Biak kemudian diproses dan diberi label.

Perjalanan bisnis ikan Yusuf hingga Biak ini bermula dari Timor Timur. Yusuf hengkang karena Timor Timur pisah dengan Indonesia. Di Bumi Lorosae, Yusuf memulai usaha perikanannya. Dia memanfaatkan jalur perdagangan Denpasar, Jakarta dan Surabaya.

“Selama di Timor-Timur, ikan yang dipasarkan antara 1 hingga 2 ton namun selama di Biak target ini belum tercapai,” tuturnya. Menurut Yusuf, selama di Timor-Timur dia mendapat kemudahan dari Dinas Perikanan, diberilah gudang.

Jika Yusuf menggeluti usahanya sejak di Timor Timur, Razak memulainya di Kota Jayapura dan Kupang serta beberapa titik di

Indonesia bagian timur. Razak mengirim lobster ke Jawa, Bali dan Makassar. Di dua lokasi tersebut, dia mempunyai gudang juga pabrik es. Lokasi operasi nelayan Razak adalah di sekitar Saumlaki, Alor sampai di Timor-Timur.

“Harus ikut prosedur ini, sebab ini juga jaminan bahwa ikan-ikan kita memang layak diperjualbelikan atau dikonsumsi,” kata Razak saat ditemui di kantor karantina Biak, (20/10).

“Hari ini saya kirim ikan tuna loin ke Makassar via Biak. Ada 3 kodi, masing-masing berukuran 35 kilo, 38 kilo dan 40 kilo,” ungkap Razak.

Apa yang dijalankan oleh Razak dan Yusuf tersebut merupakan manifestasi pilihan bertahan hidup khas perantau Bugis sekaligus implisit tanggung jawab sosial dan ke lingkungan. Mereka menggairahkan ekonomi di pesisir dan pulau-pulau, membangun kedekatan dengan nelayan-nelayan Papua yang secara perlahan masuk ke sistem dagang khas pesisir, ada nelayan, ada pedagang, penyuplai bahan bakar, hingga pedagang antar pulau. Jika dulu dengan menggunakan kapal laut sekarang gilirannya pesawat udaranya.

Yusuf berbisnis ikan sejak tahun 1996. Ia belajar tuna loin dari Daeng Ngewa, pengusaha perikanan lainnya di tahun 2012. Menurut Yusuf, usaha tuna loin ini terhubung dengan aktivitas pengirim ikan di kawasan KIMA Makassar. Di kawasan ini, hingga Batangase, Maros terdapat banyak penampung ikan. Mereka menerima ikan dari Mamuju, Tual hingga Saumlaki.

“Pengecekan kualitas ikan loin dilaksanakan di Makassar, meski demikian kami selalu ingatkan pak Haji untuk membenahi usahanya, sterilnya, pemaketannya hingga prosedur perizinannya, termasuk ‘*hazard test*’,” imbuh Andiu Roni.

Apa yang dilakukan oleh Razak dan Yusuf setidaknya menunjukkan beberapa hal yang harus pasti, yaitu harus jelas pasarnya, jaminan suplai ikan, penanganan produk serta kemampuan permodalan. Modal merupakan hal yang paling sering dikeluhkan oleh pengusaha namun bagi keduanya, hal tersebut bukanlah soal utama, bagi mereka volume usaha bisa bertahan dan berkembang secara perlahan.

“Kami juga membeli ikan dari nelayan setempat, dari Padaido, Numfor, Kampung Samber hingga Maraw. Nelayan Papua juga jual ikan ke saya, kadang satu ekor, kadang dua ekor.

Jadi kami hanya proses dan bawa ke Makassar,” beber Yusuf.

Keberadaan dua saudagar Bugis di pesisir Biak ini tak memutus kontak dagang dengan nelayan setempat. Mereka membeli ikan tangkapan nelayan Papua, dari lobster, kerapu, kakap hingga tuna. Keberadaan mereka juga berkontribusi positif pada menggeliatnya usaha perikanan. Mereka menerapkan setidaknya empat hal yang mereka sebut sebagai belajar dari pengalaman.

Dari Andiu Roni, diperoleh informasi bahwa terkait kebijakan penerimaan negara bukan pajak dari Kantor Karantina Perikanan Biak, targetnya telah melampaui target tahunan. Ada indikasi semakin menggeliatnya usaha perikanan di Papua salah satunya karena berjalannya bisnis tuna loin yang dijalankan oleh Razak dan Yusuf.

“Target balai karantina tahun 2016 ini adalah sebesar Rp. 60 juta dan untuk 1 tahun ini telah melampaui hingga 100 juta lebih setiap tahun, lokasinya meliputi Jayapura, Biak dan Mimika,” katanya. Di mata Roni, keberadaan pengusaha seperti Haji Razak dan Yusuf adalah rezeki bagi nelayan-nelayan di pesisir Biak Numfor.

“Kami selalu menjaga kemitraan dan komunikasi dengan pengusaha-pengusaha seperti mereka. Kami juga intens memberikan informasi tentang kebijakan dan peluang usaha perikanan yang efektif,” sebut Roni.

Sementara itu, bagi Yusuf dan Razak, jika ada kekhawatiran, itu adalah status lahan rumah mereka di Fandoi. Rumah yang ditempati saat ini memang dibangunnya sendiri namun lahan tinggal masih acap diklaim oleh warga setempat. Yusuf belum berani melebarkan usahanya semisal untuk membangun gudang atau sarana usaha.

“Takut dibongkar,” tutupnya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini juga dapat dibaca pada blog Kamaruddin Azis dengan link <https://denun89.wordpress.com/2017/01/18/pebisnis-tuna-loin-dari-fandoi-biak/>

PENYELARASAN TPB/SDGs DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019



Foto : Jemi Karay

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap upaya global dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan didasari oleh hak asasi manusia, kesetaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Sebelum pelaksanaan MDGs (*Millennium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Milenium) berakhir tahun 2015, Pemerintah Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam diskusi Agenda Pembangunan Paska 2015 (*The Post 2015 Development Agenda*) di tingkat internasional, termasuk *the High Level Panel of Eminent Persons* tahun 2013 dan juga memfasilitasi berbagai diskusi tingkat nasional. Di forum-forum ini, analisa dan rekomendasi pakar, pengalaman negara-negara lain, berbagai tantangan dan praktek-praktek terbaik dari MDGs dikonsolidasikan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Tindakan tanggap dari Indonesia untuk transisi ini telah membuka ruang untuk penyelarasan dengan Agenda Pembangunan Paska 2015 dan berikutnya Agenda 2030 untuk

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB). Proses yang kompleks dan tak kenal lelah ini telah memungkinkan berbagai tujuan TPB/SDGs tercermin dalam 20 prioritas pembangunan

nasional dengan 96 dari 169 target TPB/SDGs sudah terintegrasi, seperti tercantum dalam tabel berikut. Jumlahnya mungkin berubah sejalan dengan perkembangan diskusi ke depan.

Tabel Keselarasan TPB/SDGs dalam RPJMN

PILAR			TPB / SDGs GLOBAL		RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL	
			TUJUAN	TARGET	PRIORITAS NASIONAL	TARGET
SOSIAL	1		Tanpa Kemiskinan (No Poverty)	7	- Penghapusan Kemiskinan & Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan Berkelanjutan - Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal	4
	2		Tanpa Kelaparan (No Hunger)	8	Peningkatan Kedaulatan Pangan	5
	3		Kehidupan Sehat & Sejahtera (Good Health & Well-Being)	13	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat	8
	4		Pendidikan Berkualitas (Quality Education)	10	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	5
	5		Kesetaraan Gender (Gender Equality)	9	Melindungi Anak, Perempuan & Kelompok Marjinal	5
	6		Air Bersih & Sanitasi Layak (Clean Water & Sanitation)	8	Ketahanan Air	6
EKONOMI	7		Energi Bersih & Terjangkau (Affordable & Clean Energy)	8	Kedaulatan Energi	6
	8		Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work & Economic Growth)	12	- Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja - Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	9
	9		Industri, Inovasi & Infrastruktur (Industry, Innovation & Infrastructure)	8	- Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan - Penguatan Investasi - Akselerasi Industri Manufaktur - Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi	3
	10		Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities)	10	- Pengembangan Kawasan Perbatasan - Pembangunan Daerah Tertinggal - Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah - Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah	4
	11		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities & Communities)	10	Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
LINGKUNGAN HIDUP	12		Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption & Production)	11	- Peningkatan Agroindustri, Hasil Hutan Kayu, Perikanan dan Hasil Tambang Berkelanjutan - Perbaikan Kualitas Lingkungan (Termasuk Perilaku Ramah Lingkungan)	5
	13		Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)	5	Penanganan Perubahan iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan	2
	14		Ekosistem Lautan (Life Below Water)	10	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan: - Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut; - Meningkatkan Harkat Hidup Nelayan dan Masyarakat Pesisir	4
	15		Ekosistem Daratan (Life On Land)	12	Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana: - Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan - Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup - Pelestarian dan Pemanfaatan Kehati - Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar dan Penambangan Liar	7
INKLUSIF & SARANA PELAKSANAAN	16		Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh (Peace & Justice Strong Institution)	12	- Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warganegara Indonesia - Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan - Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	8
	17		Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for The Goals)	19	- Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif - Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional - Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi - Peningkatan Kualitas Data dan Informasi - Penguatan Sektor Keuangan	11

Keselarasan TPB/SDGs dalam RPJMN

Dengan Peraturan Presiden di tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs sebagai landasan hukum, Pemerintah Indonesia dengan koordinasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS membentuk Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk memimpin upaya pengintegrasian TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan pelaksanaannya. Untuk penyalarsan yang baik, upaya-upaya nasional diterapkan di tingkat subnasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan menekankan pada prioritas pembangunan, kebutuhan dan konteks daerah setempat. Untuk memfasilitasi aktor-aktor pembangunan lokal, berbagai pedoman dibuat dan dukungan teknis diberikan. Upaya-upaya penyalarsan dilakukan melalui:

- Advokasi kepada pemerintah nasional dan subnasional dan para pemangku kebijakan untuk memupuk penginternalisasian TPB/SDGs sebagai bagian integral dari kegiatan-kegiatan mereka
- Kemitraan dan koordinasi: secara vertikal untuk koherensi kebijakan dan program; dan secara horisontal untuk bekerja secara sinergis.
- Dukungan kebijakan dan teknis: berbagai forum kebijakan dan rapat teknis, konsultasi-konsultasi dan berbagai pedoman yang disusun untuk pengintegrasian TPB/SDGs: seperti penyusunan Rencana Aksi, indikator TPB/SDGs, M&E dan pelaporan TPB/SDGs juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk upaya penyalarsan.

Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan SDGs

Sesuai dengan Peraturan Presiden di tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan upaya pengintegrasian TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Peran koordinasinya meliputi Monitoring dan Evaluasi (M&E), pelaporan perkembangan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs, mendorong ketersediaan anggaran dari sumber-sumber negara dan non negara, dan pembentukan Tim Koordinasi Nasional

TPB/SDGs untuk mengarahkan upaya pembangunan di tingkat nasional dan subnasional. Tim Nasional ini, dikoordinir oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, bertugas untuk meyakinkan komitmen kuat dari tingkat nasional ke subnasional dan sinergi kerja dari berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk pencapaian target TPB/SDGs. Tim Nasional ini terdiri dari peran dan fungsi berikut: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Dewan Pakar, 4 Kelompok Kerja Teknis: 1). Pembangunan Sosial, 2). Pembangunan Ekonomi, 3). Pembangunan Lingkungan dan 4). Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*); serta Sekretariat Nasional dengan garis komando dan komunikasi (lihat organogram). Peran dan fungsi setiap unit adalah sebagai berikut.

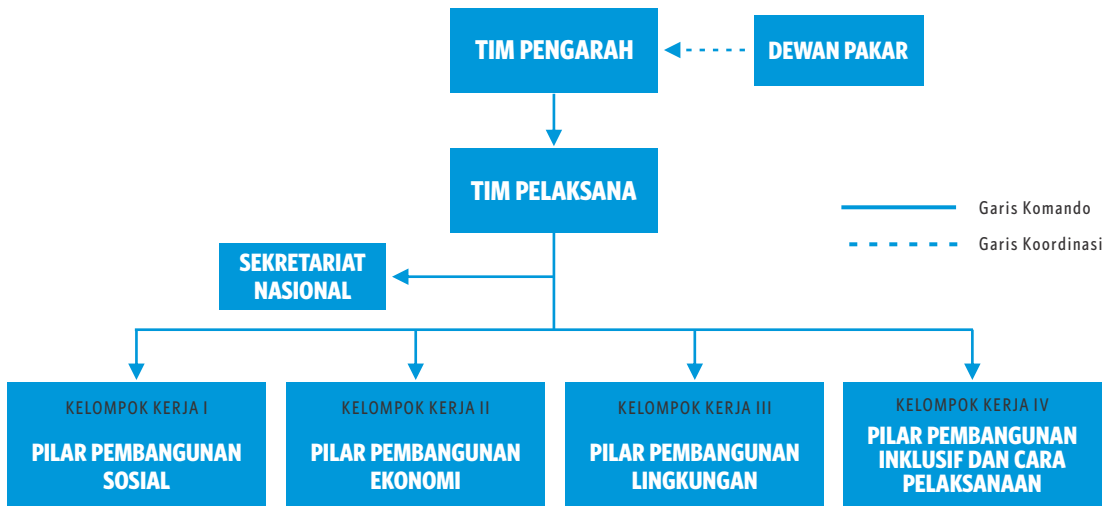
Tim Pengarah: mengarahkan berbagai upaya

PENYELARASAN DATA

Dengan keterlibatan erat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan semua pemangku kepentingan TPB/SDGs, BPS memimpin upaya memetakan target-target TPB/SDGs dan pengidentifikasian indikator yang ada di tingkat nasional dan subnasional. Pengembangan Definisi Operasional resmi meyakinkan kesamaan pemahaman terhadap target dan indikator SDGs di antara aktor-aktor. Bersama dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BAPPENAS, BPS mengelola dan memutakhirkan Database SDGs di tingkat nasional dan subnasional.

BPS juga memberi bantuan teknis terkait pengumpulan, analisa, pelaporan data dalam upaya menangani ketidakmerataan sumberdaya dan kapasitas para pemangku kepentingan untuk pemantauan kemajuan dengan lebih baik.

TIM KOORDINASI NASIONAL TPB / SDGs



pencapaian TPB/SDGs di Indonesia dan menyampaikan laporan perkembangan TPB/SDGs kepada Presiden Indonesia. Tim ini membentuk Sekretariat Nasional, yang terdiri dari staf berpengalaman.

Tim Pelaksana: ditugasi mengkoordinasikan kegiatan berikut: (1) penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs dan Rencana Aksi Nasional (RAN), (2) diseminasi dan advokasi serta fasilitasi kepada aktor-aktor subnasional dalam penyusunan TPB/SDGs Rencana Aksi Daerah (RAD), (3) dukungan kepada empat Kelompok Kerja TPB/SDGs dalam melaksanakan tugasnya, (4) penerapan strategi komunikasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, (5) M&E dan pelaporan perkembangan TPB/SDGs di tingkat nasional dan provinsi, (6) penyampaian laporan rutin TPB/SDGs kepada Tim Pengarah.

Dewan Pakar: terdiri dari pengamat senior, akademisi dengan keahlian dan pengalaman untuk memberi rekomendasi pakar dan manajemen serta berbagai masukan kepada Tim Pengarah untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

4 Kelompok Kerja Teknis: bertugas untuk (1) menyusun Peta Jalan TPB/SDGs Nasional dan Rencana Aksi Nasional (RAN), (2) membantu dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), (3) mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Peta Jalan, Rencana Aksi dan pelaporan TPB/SDGs nasional, (4) mengidentifikasi berbagai faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan Peta Jalan TPB/SDGs di tingkat nasional dan subnasional di keempat sektor Kelompok Kerja (Pokja) (5) mengembangkan rencana kerja TPB/SDGs di sektor masing-masing, (6) melaksanakan komunikasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, (7) melakukan M&E dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi di tingkat nasional dan subnasional.

Sekretariat Nasional: bertugas (1) membantu kegiatan Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs, (2) menyusun berbagai pedoman umum dan teknis untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, M&E dan pelaporan TPB/SDGs di tingkat nasional dan subnasional, (3) membantu Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TPB/SDGs kepada berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, (4) mendesain strategi komunikasi dan advokasi, (5) melaporkan kegiatan Sekretariat kepada kepala Tim Pelaksana.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mendorong partisipasi kuat dari berbagai pemangku kepentingan dalam rapat-rapat koordinasi yang merupakan forum untuk mengidentifikasi berbagai kesempatan, tantangan dan kesenjangan untuk solusi program, berbagai ide, aspirasi dan pengalaman untuk memfasilitasi pembelajaran dan untuk membentuk proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Ini semua ditujukan

untuk secara optimal menggalang peran penuh para pemangku kepentingan untuk percepatan kinerja TPB/SDGs.

Mekanisme tim koordinasi ini juga dibangun di tingkat provinsi dan terdiri dari berbagai Dinas/Badan terkait setempat dan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. Tim TPB/SDGs daerah bekerja untuk mendorong pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs daerah, mendorong pendanaan, melakukan M&E dan pelaporan serta aktifitas advokasi di daerah masing-masing.

Dari Komitmen Global ke Tindakan Konkret Nasional dan Subnasional

Di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan kemitraan erat dengan para pemangku kebijakan, Indonesia telah memulai upaya-upaya pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan program yang berkelanjutan. Perhatian khusus diberikan untuk meyakinkan komitmen dan program selaras dengan konteks dan prioritas lokal dan menjawab kebutuhan setempat. Pengintegrasian TPB/SDGs dilakukan melalui 3 penekanan: Pengarusutamaan, Akselerasi

Pencapaian TPB/SDGs dan Dukungan Kebijakan (*Mainstreaming, Acceleration of SDGs attainment and Policy Supports* (MAPS)) yang dapat diterapkan secara berbarengan.

Pengarusutamaan TPB/SDGs

Komitmen untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai prioritas nasional dan subnasional diterjemahkan ke dalam kerangka hukum berikut untuk menggerakkan respon yang luas sebagai tindakan nyata:

- Peraturan Presiden: menekankan pada (a.) kemitraan kuat antara Pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan; (b.) ketersediaan data; (c.) alokasi anggaran dalam APBN dan APBD.
- Tim Koordinasi Nasional SDGs : terdiri dari perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan, ditugaskan untuk mengarahkan perencanaan, pelaksanaan TPB/SDGs dan melakukan Monitoring dan Evaluasi (M&E).
- Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri: mendorong aksi tindak lanjut dari para gubernur, bupati, walikota dan parlemen.
- Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi TPB/SDGs: 34 gubernur mengeluarkan peraturan yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan TPB/SDGs di masing-masing wilayah.

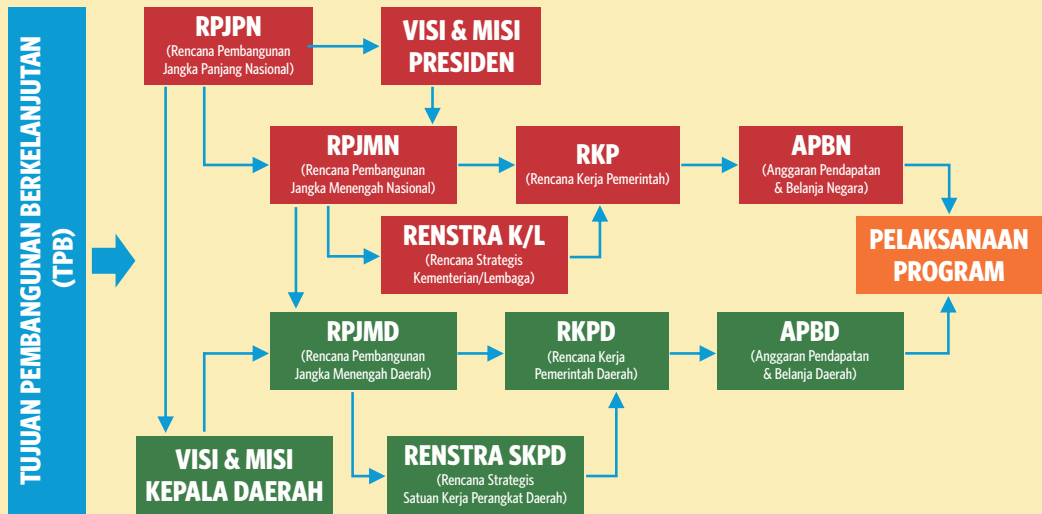
Peraturan Presiden menjadi landasan hukum untuk penyusunan dokumen pembangunan nasional dan subnasional berikut ini, sesuai dengan prioritas pembangunan, program, target dan anggaran setempat :

- Peta Jalan TPB/SDGs 2016-2030: menggelar aksi strategis untuk TPB/SDGs dalam periode 2016-2030 sebagai penyaluran upaya pembangunan nasional untuk pencapaian target-target TPB/SDGs, diikuti dengan :
- Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan subnasional: ini merupakan dokumen kerja dinamis yang menyebutkan upaya program nasional dan subnasional yang konkrit, konsisten dengan konteks, prioritas dan kebutuhan setempat.
- Pembuatan pedoman teknis untuk membantu penyusunan Rencana Aksi

KOORDINASI UNTUK MEMANTAU KEMAJUAN

Untuk mendorong saling berbagi data (data sharing) guna pemantauan dan pelaporan tepat waktu, koordinasi dan kemitraan yang lebih baik perlu dipupuk antara BPS sebagai lembaga teknis, berbagai lembaga lain penghasil data (seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, filantropi dan pelaku usaha, para pakar dan perguruan tinggi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang memimpin koordinasi pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional.

Bagan: Pengarusutamaan TPB/SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Indonesia



Daerah, Definisi Operasional dari berbagai indikator TPB/SDGs, pedoman untuk E-M&E, pelaporan TPB/SDGs tahunan, pembentukan Database TPB/SDGs dan website.

Untuk memantau kemajuan, pemerintah dan perwakilan dari pemangku kepentingan dan dengan dukungan teknis dari BPS melakukan proses yang kompleks untuk memetakan target dan indikator TPB/SDGs global dengan konteks dan indikator nasional. BPS dan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertugas mengelola dan memutakhirkan Database TPB/SDGs. Suatu metode perlu dikembangkan untuk memfasilitasi salingberbagi data (*sharing of data*) di antara semua pemangku kepentingan dan untuk mempertimbangkan penggunaan data yang dikumpulkan, dianalisa dan dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil (walau terbatas dalam lingkup dan area) untuk mendukung pemantauan, menangkap tren dan menganalisa kemajuan dan kesenjangan di area geografi spesifik untuk memungkinkan solusi program.

Dukungan Kebijakan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian/

Lembaga Teknis memberikan fasilitasi, pelatihan dan konsultasi yang dibutuhkan untuk penguatan kapasitas para pemangku kepentingan nasional dan subnasional dalam pengintegrasian agenda TPB/SDGs di semua aspek dengan baik. Dukungan diberikan untuk tindakan yang tepat: dari penyusunan kerangka legal, pelaksanaan, proses M&E dan pelaporan. Pedoman teknis dan tool kits dikembangkan dan advokasi dilakukan untuk dukungan: kebijakan, politis, programatik dan pendanaan untuk meyakinkan aksitanggap yang kuat.

Dukungan khusus diberikan untuk kebijakan terkait ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs. Konsultasi teknis diselenggarakan untuk meyakinkan kualitas data yang baik dari pengumpulan, analisis, pelaporan dan pencatatan yang tepat. Dukungan juga diberikan untuk mendorong penggunaan data dalam mendesain program, memfasilitasi salingberbagi data (*sharing of data*) di antara pemangku kepentingan, dan untuk pelaporan tepat waktu dan pemantauan ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut hubungi:
sekretariat.sdgs@bappenas.go.id atau **www.sdgsindonesia.or.id**
 Facebook: **SDGSIndonesia** Twitter: **@SDGSID**



UNICEF

Pemkab Gowa dan Pemkot Makassar Gelar Konsultasi Publik PPKAI

Oleh **RAHMAN RAMLAN**

Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kota Makassar atas fasilitasi Yayasan BaKTI dan dukungan UNICEF menggelar Konsultasi Publik Peraturan Bupati Gowa dan Peraturan Walikota Makassar tentang Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI), Senin (5/12) di Hotel Ibis Makassar. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Gowa, H. Syamsuddin Bidol dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasi atas digelarnya konsultasi

publik secara bersama antara kabupaten Gowa dan kota Makassar. Menurutnya, permasalahan anak yang terjadi di kabupaten Gowa tidak lepas dari imbas berkembangnya kota dan meningkatnya mobilitas penduduk antara Gowa dan Makassar. Banyak ditemukan kasus yang melibatkan anak-anak di mana kejadiannya di Gowa, tapi tempat tinggalnya di Makassar, demikian pula sebaliknya.

Oleh karena itu, H. Syamsuddin berharap dengan hadirnya Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di dua daerah bertetangga ini dapat



Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Gowa, H. Syamsuddin Bidol, memberikan penjelasan dalam kegiatan konsultasi Publik PPKAI.

Foto: Yayasan BaKTI/Rahman Ramlan

menjembatani penanganan masalah anak secara integratif.

Sementara itu, Amelia Tristiana, *Child Protection Specialist* UNICEF FO Makassar, secara khusus menyampaikan selamat kepada Pemkab Gowa dan Pemkot Makassar atas upaya kerasnya mewujudkan lahirnya Peraturan Bupati Gowa dan Peraturan Walikota Makassar tentang PPKAI. Bahkan kota Makassar telah melaunching PPKAI pada bulan September, dan disusul oleh Pemkab Gowa pada bulan November 2016.

“Pada awal tahun 2017 kedua daerah ini akan menjadi daerah pembelajaran bagi daerah lainnya di Indonesia khususnya tentang Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif, sehingga melalui forum ini diharapkan dapat segera disepakati beberapa SOP yang mendukung operasionalisasi Perbup dan Perwali,” harap Ibu Tristiana.

Untuk memperoleh berbagai masukan terkait Perbup dan Perwali tentang PPKAI, Panitia mengundang kurang lebih 30 orang dari unsur SKPD terkait dari kabupaten Gowa dan Makassar seperti Bappeda, Dinas Sosial, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan & Anak, serta dari bagian hukum dan organisasi Sekretariat daerah. Sementara dari unsur penggiat sosial dan anak dibawah koordinasi Dinas Sosial juga diundang seperti P2TP2A, Sakti Peksos, Forum Kab/Kota sehat, Forum LKSA kab/kota, dan pemerhati sosial dan anak lainnya.

Kegiatan Konsultasi Publik yang difasilitasi oleh Luna Vidya dari BaKTI berhasil menyepakati 2 hal:

Pertama bahwa Pemkot Makassar diharapkan segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas Draft Perwali sesuai masukan dari forum, untuk selanjutnya segera di tetapkan oleh Walikota Makassar. Sementara dari kabupaten Gowa yang telah melakukan penetapan oleh Bupati Gowa pada tanggal 10 November 2016, dapat mengembangkan SOP-nya sesuai masukan dari forum. Kedua, Penting bagi dua kabupaten untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada public mengenai Perbup/Perwali tentang PPKAI agar keterlibatan masyarakat untuk menggunakan jasa layanan tersebut makin meningkat. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi mengenai Program UNICEF yang dikelola oleh BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

SATU PETA UNTUK SATU TUJUAN: MAJU DAN SEJAHTERA!

“Kami sempat punya masalah tentang pemetaan lahan. Ada sebuah kawasan yang salah diinterpretasikan. Satu pihak memandang sebagai kawasan hutan, satu pihak memandang sebagai bukan kawasan hutan. Masalah ini masih berusaha kami selesaikan,” kata Ammar Sholahuddin, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Provinsi Jambi.



Foto : Yayasan BaKTI/Syaifulah

Cerita itu menjadi pembuka dalam pertemuan antara tim Land Equity International (LEI) dengan BAPPEDA Provinsi Jambi yang dilaksanakan tanggal 2 Desember 2016 di ruang rapat BAPPEDA Provinsi Jambi.

Pertemuan tersebut adalah bagian akhir dari kegiatan lokakarya *Desktop Information Management System* (DIMS) dan WebGIS yang digelar oleh LEI di Jambi. Sejak empat hari sebelumnya, lokakarya sudah mulai digelar. Dua hari pertama dimulai dengan pengujian yang bertujuan untuk menguji sistem versi beta dari aplikasi GIS Desktop pada perangkat komputer (PC). Setelahnya pelatihan dan lokakarya digelar untuk melatih tenaga admin yang berasal dari beberapa unsur dinas-dinas.

Pelatihan yang digelar oleh LEI ini adalah pelaksanaan proyek *Participatory Mapping and Planning* (PMAp) yang merupakan salah satu kegiatan dari komponen *Participatory Land Use Planning* (PLUP) yang digagas oleh MCA-Indonesia. Tujuan utamanya adalah melakukan pemetaan lahan dengan metode partisipatif yang melibatkan warga.

Dalam sambutannya, Imelda Sihombing, *Government dan Stakeholder Liaison Specialist* dari LEI sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah provinsi Jambi yang memperlancar kegiatan pelatihan dan lokakarya tersebut. Imelda bahkan menyebut jumlah peserta yang ternyata lebih besar dari yang mereka perkirakan.

“Dalam minggu ini target kami adalah mengidentifikasi para peserta pelatihan Web GIS ini, siapa-siapa yang berpotensi menjadi admin di masing-masing SKPD-nya,” kata Imelda Sihombing. Dia lalu menambahkan harapan bahwa ketika sistem diserahkan ke provinsi dengan BAPPEDA sebagai wakilnya, sistem benar-benar sudah bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik.

Rencananya paling tidak akan ada lima orang yang mewakili lima SKPD yang berbeda yang akan menjadi admin. Kelimanya diharapkan berasal dari BAPPEDA, Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, Perizinan dan Dinas Pertambangan.

Menarik Investor dan Meningkatkan PAD

Land Equity International atau LEI adalah salah satu mitra MCA-Indonesia untuk kegiatan PMAp. Dimulai sejak Januari 2016, MCA-Indonesia Indonesia memberikan amanat kepada LEI untuk melaksanakan kegiatan PMAp2 di 9 kabupaten di 3 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jambi.

Tugas utama PMAp2 adalah melakukan:
1) Inventarisasi data geospasial dan pembangunan basis data GIS untuk penatagunaan lahan/tutupan lahan;
2) Kompilasi dan membuat rujukan data geospasial khususnya terhadap izin-izin yang berhubungan dengan tata guna lahan; dan
3) Penguatan tata ruang kabupaten melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, serta peningkatan penggunaan basis data dalam pengelolaan informasi tata guna lahan.

Apa yang dilakukan di Provinsi Jambi memang baru pada tahap awal. Setelah pelatihan dan lokakarya ini, LEI akan mendatangkan alat yang dibutuhkan, menjalankan proses instalasi dan akan ada lagi pelatihan yang lebih intensif untuk para admin dan para pengguna data.

Secara sederhana, pemetaan lahan dengan model partisipatif ini adalah cara untuk melibatkan semua pihak dalam proses memetakan lahan mereka sendiri. Mereka yang turun ke lapangan akan membawa telepon pintar (*smartphone*) yang sudah dipasangkan program khusus. Merekalah yang akan berdiri di satu titik dan memasukkan koordinat titik tersebut ke dalam peta. Pengolahan data selanjutnya akan dilakukan oleh tim admin yang memang punya tingkat otorisasi yang lebih tinggi daripada tim pemasok data.

Admin ini ditunjuk oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Mereka berfungsi sebagai pihak yang melakukan verifikasi data atau sebagai polisi data. Dalam bekerja mereka dibekali dengan kemampuan teknis dan petunjuk tentang standar data.

Data yang telah terverifikasi selanjutnya akan dimunculkan ke dalam satu peta daring (*online*) yang memuat berbagai macam data.



Suasana pertemuan wakil dari LEI bersama BAPPEDA Jambi dan pihak MCAI . Foto : Yayasan BaKTI/Syaifullah

Diharapkan dengan sistem ini potensi sengketa lahan bisa ditekan, utamanya karena adanya kesamaan perangkat dan sistem yang digunakan oleh beragam SKPD.

Selain itu, kelengkapan data yang bisa diakses dengan mudah juga berpengaruh besar pada iklim investasi. Para investor yang berniat masuk ke satu daerah tentu akan merasa sangat terbantu dengan benderangnya data yang tersedia. Setidaknya mereka bisa menghemat banyak waktu dan biaya untuk melakukan surveilokasi.

Diharapkan dengan adanya sistem pemetaan yang lebih lengkap seperti yang sedang dikerjakan, kasus seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Imelda Sihombing memberikan contoh bagaimana pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berhasil memanfaatkan sistem WebGIS. Sistem yang sudah terintegrasi dan mudah diakses itu berhasil menarik banyak investor yang memang butuh kepastian ruang dan kemudahan di perizinan. Semakin banyak investor tentu akan semakin memberi pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat pentingnya fungsi dan peran dari peta yang dikerjakan bersama ini, pemerintah

Provinsi Jambi melalui BAPPEDA berjanji akan memberi dukungan dari sisi kelembagaan. Dukungan yang dimaksud adalah dukungan dari segi birokrasi dan struktural yang tentunya akan memperjelas posisi kerja para admin dan pendukungnya.

Dukungan untuk One Map Policy

Apa yang dikerjakan oleh LEI lewat dukungan MCA-Indonesia adalah salah satu cara untuk mendukung program Kebijakan Satu Peta atau "One Map Policy". Kebijakan Satu Peta ini terlahir karena Info Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi). Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan, maka IGT yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Walhasil, peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis, skala maupun georeferensi-nya.

Sistem yang dibangun oleh LEI tentu saja merujuk pada sistem dan aturan yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sehingga



Kelengkapan data yang bisa diakses dengan mudah juga berpengaruh besar pada iklim investasi. Para investor yang berniat masuk ke satu daerah tentu akan merasa sangat terbantu dengan benderangnya data yang tersedia.

tentu saja akan mencegah adanya kesimpangsiuran data.

Dalam pertemuan di ruang rapat BAPPEDA Provinsi Jambi tersebut, pihak LEI juga mempresentasikan sistem dan cara kerja WebGIS yang mereka kembangkan. Presentasi ini memberi gambaran singkat tentang cara kerja dan kelebihan serta kekurangan dari sistem yang sementara dibangun.

Pertanyaan teknis muncul dari para peserta yang merupakan wakil dari berbagai SKPD, termasuk kemungkinan untuk mengembangkan data yang sudah ada.

Menurut Imelda Sihombing, data peta yang dimiliki sekarang masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Data yang digunakan LEI saat ini memang masih menggunakan data lama, termasuk rencana tata ruang dan wilayah yang sudah berubah.

“Masih banyak data yang bisa dikembangkan sesuai data-data baru yang dimiliki setiap SKPD. Data yang kami punya sekarang ini memang masih data awal,” kata Imelda Sihombing.

LEI mempersilakan aparat SKPD Provinsi Jambi dan kabupaten-kabupaten yang ada di Jambi untuk mengembangkan sendiri peta yang ada sekarang. Dalam prosesnya pihak-pihak terkait tentu saja boleh memasukkan data-data paling m u t a k h i r y a n g b i s a mengembangkan peta yang sudah ada. LEI juga sudah membuat

sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap data yang sudah masuk.

Belajar dari pengalaman yang sudah ada, persoalan lahan memang bisa membawa risiko besar untuk berbagai pihak. Dari potensi sengketa lahan sampai kebingungan ketika akan melakukan perencanaan dan pengembangan daerah. Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satu cara untuk menekan potensi risiko itu, dan apa yang dilakukan LEI di Jambi dirasa sudah berada di trek yang benar.

Dengan data yang akurat dan peta yang terintegrasi serta mudah diakses, pemerintah daerah punya kemudahan untuk membuat perencanaan dan pembangunan. Pada akhirnya, daerah diharapkan bisa lebih maju dan sejahtera. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA - Indonesia, hubungi info@bakti.or.id

Credit Union Letekonda Bebaskan Warga dari Rentenir

Kesulitan uang tunai sangat dirasakan warga Desa Letekonda, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Lahan yang kering dengan curah hujan yang rendah, tidak banyak membantu warga mendapatkan uang tunai dari menjual hasil kebun. Uang tunai di Letekonda umumnya dibutuhkan untuk membiayai pendidikan anak.

Masa pendaftaran sekolah anak-anak yang jadi mahasiswa merupakan saat paling sulit yang kerap dihadapi warga Letekonda. Seringkali rentenir jadi satu-satunya jalan mendapatkan uang tunai. Bunga pinjaman 20-25 persen per bulan sungguh mencekik, tetapi tetap diterima.

Tahun 2010 atas inisiatif Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sumba Barat membentuk sebuah unit simpan pinjam untuk meningkatkan pendapatan warga. Unit simpan pinjam ini berupa credit union sehingga tidak menggunakan modal dari luar, tapi dari masyarakat dan dimanfaatkan oleh para anggota sendiri. Pembentukan unit simpan pinjam yang bernama CU Letekonda diawali dengan pembinaan WVI Sumba Barat dan Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D).

Mulanya hanya 23 orang yang tergabung menjadi anggota. Pengurus sukarela dan anggota yang masih sedikit tidak jadi soal. Semangat untuk maju untuk mengubah nasib terus bergelora.

Perlahan tapi pasti, para pengurus meyakinkan masyarakat. Integritas pengurus serta transparansi keuangan CU menjadi bukti nyata bagi calon anggota. CU Letekonda semakin menarik minat banyak orang.

Ada banyak keuntungan menjadi anggota CU Letekonda. Yang pertama, CU memberikan bunga pinjaman yang rendah, hanya 3 persen dan berlaku menurun. Pinjaman ini diutamakan untuk kebutuhan pendidikan anak, usaha produktif atau masalah kesehatan. Alfonsius Zudi, seorang petani rumput laut, merasa sangat bersyukur karena bunga pinjaman di CU Letekonda jauh lebih rendah daripada yang dikenakan rentenir. “Anak saya Stefania sekarang sudah kuliah di Jawa,” ujar Alfonsius.

Keuntungan kedua, produk-produk CU yang dapat diperoleh jika menjadi anggota. Produk CU antara lain *simpanan pendidikan* untuk merancang kebutuhan masa depan sekolah anak, *simpanan hari tua* untuk tabungan di masa tua. Juga ada simpanan bunga harian yang merupakan tabungan dan dapat diambil kapan saja dengan bunga harian. Seluruh produk dapat digunakan oleh anggota CU untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak.

Keuntungan ketiga, CU Letekonda sudah mendaftarkan diri dan memperoleh Dana Perlindungan Bersama (Daperma), sehingga menjadi perlindungan bagi para anggotanya. Jika ada anggota yang meninggal dunia dan masih ada pinjaman, maka Daperma dapat menanggulangnya. Demikian juga jika ada



Papan Informasi CU Letekonda merupakan salah satu alat komunikasi diantara anggota dan pengurus CU. Seluruh kegiatan dan pertanggungjawaban bulanan dari pengurus dipampang secara transparan dalam media ini.

Foto : Wahana Visi Indonesia.

kemungkinan pinjaman tidak dibayarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat ditanggulangi pula dengan Daperma.

Saat ini CU Letekonda sudah berkembang pesat. Pada Maret 2016 digelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015. Pada RAT ini dipaparkan bahwa CU telah memiliki anggota sebanyak 1.064 orang, dengan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai 270 juta rupiah. Tidak tanggung-tanggung, total aset yang telah dikelola CU Letekonda bernilai 3,9 milyar rupiah.

Karena terus berkibar, CU Letekonda menarik pemerintah daerah setempat. Dinas Koperasi Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian memberikan dukungan dan pemantauan, bahkan selalu ikut setiap RAT yang diadakan oleh CU Letekonda. CU ini kemudian menjadi salah satu koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan telah dikuatkan menjadi lembaga hukum.

"Motto kami adalah jika kamu susah, saya bantu. Jika saya susah, kamu bantu," katas Marthen.●

Kursus Potensi Diri Antar Remaja Jadi Agen Perubahan

Kursus Potensi Diri adalah kegiatan yang diinisiasi Wahana Visi Indonesia diTimor Tengah Utara. Kegiatan ini ditujukan bagi remaja berusia 13-18 tahun.

Kursus Potensi Diri berawal dari kekhawatiran WVI atas minimnya kegiatan positif bagi remaja. Dari hasil asesmen yang dilakukan pada 2014, diketahui di dua desa yaitu Desa Tuabatan Barat, Kecamatan Miomafo Tengah dan Desa Oenenu Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, belum melaksanakan kegiatan pengembangan remaja, baik program pemerintah, sektor agama, maupun kegiatan di sekolah.

Tidak adanya kegiatan untuk remaja dapat menghambat pengembangan diri dan juga berakibat pada tidak adanya wadah bagi remaja untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Padahal remaja memiliki potensi menjadi agen perubahan.

Kursus Potensi Diri bertujuan untuk memperlengkapi remaja dengan keterampilan hidup dasar, sehingga mereka menjadi individu yang tangguh dan siap berkontribusi bagi pengembangan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan mereka.

Modul pendidikan kemasyarakatan yang menjadi panduan pelaksanaan dikembangkan oleh WVI Nusa Tenggara Timur dan merupakan hasil uji coba di beberapa kabupaten dampingan.

Modul ini terdiri dari lima tema utama, yaitu: Mengenal Diriku; Mengenal Lingkunganku; Keterampilan Komunikasi Dasar; Ayo Bangun Mimpi; dan Kenali Hak Anak.

Tema 'Mengenal Diriku' mengajak anak untuk mengenali kekuatan, kelemahan, bakat, minat, dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah membentuk dirinya saat ini. Kemudian, anak diajak untuk menyadari bahwa dirinya merupakan anggota masyarakat mulai dari unit

terkecil yaitu keluarga sampai di tingkat desa.

Anak diminta untuk mengkomunikasikan pandangan mereka dari hasil pengenalan diri dan lingkungan baik secara verbal maupun non verbal. Hasil-hasil yang mereka temukan dalam diri mereka dan lingkungan kemudian diolah untuk menjadi jembatan yang dapat mendukung mereka dalam meraih mimpi mereka.

Tentunya terdapat juga situasi-situasi yang justru menghambat anak dalam meraih mimpi mereka, situasi-situasi tersebut akan dianalisa sederhana dalam tema 'Kenali Hak Anak' dengan mengajak peserta untuk mengenali situasi anak di lingkungan mereka yang menghambat tercapainya kesejahteraan anak.

Metode Beragam

Metode yang digunakan WVI beragam dan partisipatif seperti diskusi dan saling berbagi cerita dalam kelompok serta permainan edukatif.

Umumnya kegiatan dilakukan setelah jam pulang sekolah di ruang kelas, lapangan sekolah dan di lingkungan desa. Pada tahun ini pendekatan Kursus Peningkatan Diri lebih kepada meningkatkan inisiatif anak melalui proyek-proyek mini yang berhubungan dengan materi-materi modul yang telah diberikan.

Pada Mei lalu misalnya, peserta Kursus Peningkatan Diri telah mengadakan kegiatan Malam Keluarga. Pada kegiatan ini peserta dapat menampilkan bakat dan minat yang mereka miliki seperti menyanyi, pantun dan berpuisi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak mengapresiasi peran keluarga terkhusus orang tua dan desa mereka dengan menyajikan sebuah film dokumenter mengenai desa mereka.

Hasil yang dicapai sejauh ini adalah 60 orang anak remaja dari dua desa yang selama satu



Nickson (salah satu staf WVI ADP TTU) memberikan pelatihan untuk membuat sebuah film sederhana. Dari pelatihan tersebut, peserta KPD membuat sebuah film dokumenter tentang desa mereka yang ditayangkan dalam acara “Malam Temu Keluarga” di Desa Tuabatan Barat. **Foto : Wahana Visi Indonesia**

tahun terakhir didampingi melalui kegiatan Kursus Peningkatan Diri menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Mereka menjadi termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, walaupun masih berproses.

Sebagian besar yang terlibat juga memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk menampilkan jati diri dan potensinya serta untuk mengungkapkan pandangannya. Kegiatan Kursus Peningkatan Diri sebagai kegiatan yang berhubungan dengan remaja tentunya juga membutuhkan dukungan dari orang dewasa terutama orangtua, pihak sekolah, dan aparat desa. Karenanya pada tahapan selanjutnya, selain para fasilitator, perwakilan aparat desa juga perlu mendapatkan pelatihan agar memiliki pemahaman yang sama dan dapat berperan dalam mendukung Kursus Peningkatan Diri dan keberlanjutannya. Kegiatan seperti Malam Keluarga juga menjadi salah satu kegiatan untuk memberikan pencerahan kepada orang tua agar mendukung potensi anak-anaknya. Tahapan berikutnya,

WVI juga melakukan pertemuan orang dewasa dengan harapan dapat membuka wawasan *stakeholder* mengenai potensi remaja dan kemungkinan bagi remaja untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui pendampingan bagi remaja agar mampu berkontribusi bagi diri sendiri dan lingkungan, fasilitator yang memahami kepentingan anak, serta pemerintah desa yang menyediakan wadah partisipasi bagi anak, diharapkan KPD dapat diadopsi oleh desa dalam bentuk forum anak desa yang merupakan forum resmi bagi seluruh anak desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan diri.

Melalui forum ini, anak dapat menyuarakan rencana pembangunan pada Musrenbang, yang kelak juga dapat dinikmati oleh anak terutama dalam pemenuhan hak anak. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai praktik cerdas Wahana Visi Indonesia dapat menghubungi info@bakti.or.id



Pendekatan Berbasis Aset : Mengawal Perubahan Sikap

Kabar dari Pokja AMPL Sulawesi Selatan

Oleh **RAHMAN RAMLAN**

Pak Gun berjalan menunduk, matanya menatap sendu. Satu persatu peserta dan panitia disalaminya. Dia berpamitan pulang ke kampungnya di Jeneponto. Kesedihan menyelimuti raut mukanya, dia masih tidak percaya, bahwa pelatihan yang diikutinya selama dua hari telah berakhir.

“Saya sangat menikmati pelatihan ini, belum pernah saya segembira ini, seperti muda kembali. Andai bisa ditambah waktunya, saya akan betah,”ungkapnya di sesi penyampaian kesan terakhir sebelum penutupan Pelatihan

Asset Based Approach yang dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI bekerjasama dengan UNICEF di Makassar, 1-2 Desember 2016.

Abadi Gunawan atau lebih akrab dipanggil Gun adalah salah satu peserta dari unsur PNS yang bergabung dalam Kelompok Kerja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan). Beberapa tahun lagi dia akan pensiun, dia berharap dapat mengakhiri karirnya sebagai PNS di Bidang yang ditekuninya sekarang di Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. “Mimpi saya tidak banyak lagi, saya hanya berharap dapat menjalani hari tua dengan melihat anak-anak saya menikah dan memberi saya cucu



Abadi Gunawan atau lebih akrab dipanggil Gun, salah satu peserta dari unsur PNS yang bergabung dalam Kelompok Kerja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), sedang memberikan tanggapan.

Foto: Yayasan BaKTI/ Rahman Ramlan

dimana saya terlibat dalam perawatan dan penjaagaan mereka,”ujarnya

Bukan hanya pak Gun, seluruh peserta dari 7 kabupaten/kota dampingan Program WASH UNICEF (Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Barru, Wajo, Luwu Utara, dan Toraja Utara) mengakui bahwa pelatihan yang difasilitasi oleh INSPIRIT memberikan perubahan cara pandang tentang kehidupan yang lebih optimis. Bahkan mereka berani menyatakan mimpi besarnya 20 tahun ke depan.

Selama dua hari kegiatan, Dani Wahyu Manggoro dan Budhita Kismadi berhasil memotivasi kurang lebih 30 orang peserta pelatihan yang terdiri dari anggota Pokja AMPL kabupaten/kota, fasilitator kelembagaan WASH Unicef, dan staf BaKTI untuk berani bermimpi, baik itu mimpi pribadi maupun mimpi kolektif sebagai organisasi Pokja AMPL.

Menurut Dani, mimpi yang dicanangkan bukanlah sekedar impian biasa. Di sana ada sebuah keyakinan untuk menjadi lebih berbeda di masa yang akan datang. Sebuah mimpi besar

yang didukung oleh rancangan langkah baru yang inovatif. Di sana ada perpaduan energy positif, penyatuan kekuatan jiwa, optimalisasi otak kanan yang kemudian disebut sebagai kekuatan insani yang luar biasa. “Jadi tidak perlu kuatir untuk bermimpi besar!”, himbaunya.

Proses menuju pernyataan mimpi besar itulah yang membuat para peserta merasakan perubahan yang bisa langsung dilihat. Peserta dari Luwu Utara, Samri bahkan mengakui bahwa di awal pelatihan dia menganggap apa yang dipelajarinya bertentangan dengan kepercayaannya. “Di agama saya dianjurkan untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong, tapi di sini malah diminta mengakui kelebihan dan membanggakannya di depan umum. Awalnya saya pesimis dengan pelatihan ini. Tapi setelah mengikuti tahapan demi tahapan hingga akhir, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Inilah pelatihan yang paling bisa membangkitkan kekuatan dalam diri untuk berbuat lebih bermakna bagi diri, keluarga dan

masyarakat,” ungkap lelaki yang suka bercelana jingkrang ini.

Menurut Dani, sesungguhnya apa yang kita akui sebagai kekuatan diri, bukanlah sebuah kesombongan. Itu adalah cara kita menghargai anugerah Tuhan. Seperti Syahadat dalam Islam sebagai pernyataan pengakuan tidaklah sah jika hanya diucapkan dalam hati, dia harus dilafalkan- disuarakan. Demikian pula kekuatan diri, harus disuarakan untuk membangkitkan kepercayaan pada diri dan memberi inspirasi bagi orang lain bahwa merekapun bisa melakukan hal yang sama. Demikian pula mimpi, dia juga tidak bisa hanya tinggal dalam fikiran dan angan, namun harus dinarasikan dan divisualisasikan.

Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Irawan Bintang yang berkesempatan membuka pelatihan turut larut dalam sesi awal pelatihan. Dia ikut bermain, berbagi cerita, berdiskusi dan

bekerja dalam kelompok, menulis puisi dan turut membacakannya di hadapan peserta lain. “Meskipun saya tidak mengikuti pelatihan secara utuh, saya bisa merasakan perbedaannya dari pelatihan yang biasa saya hadiri. Insya Allah, saya akan mengagendakan pelatihan sejenis untuk staf di kantor,” harapnya.

Sementara itu, Wildan Setiabudi dari UNICEF Makassar yang menutup kegiatan menunjukkan rasa bangganya melihat Mimpi Besar yang dinyatakan oleh peserta. “Terima kasih banyak kepada INSPIRIT yang telah memfasilitasi pelatihan ini dengan luar biasa. Juga kepada BaKTI yang berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan luar biasa. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini dengan antusias. Semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas Pokja kita di daerah,” pungkasnya sambil mengajak seluruh hadirin menutup kegiatan bersama-sama. ●

Pemerintah Apresiasi Penguatan Kegiatan Pokja AMPL Sulawesi Selatan

“Saya sangat ingin menulis, tapi saya tidak tau harus mulai dari mana”. “Kalau saya memang malas. Bila disuruh menulis, seperti disuruh mengangkat beban berat”. “Banyak ide di kepala, tapi bingung memilih ide yang bagus”. “Bagaimana caranya memelihara mood dalam menulis?”

Menjawab permasalahan di atas, dan untuk memperkuat kemampuan menulis peserta, Yayasan BaKTI mengajak dua blogger menjadi fasilitator Pelatihan Menulis. Syaifullah dan Mansyur Rahim berbagi pengetahuan dasar-dasar menulis dan kiat menulis di dunia maya yang dilatihkan secara teori dan praktik dengan Pokja AMPL Sulawesi Selatan.

Harapan Pemerintah

Selama 2 hari (10-11 November 2016), bertempat di Kantor BaKTI, Jalan Andi Mappanyukki Makassar, 18 peserta dari

perwakilan SKPD terkait yang tergabung dalam Pokja AMPL di tingkat provinsi SulSel dan 3 kabupaten target UNICEF yakni Kabupaten Takalar, Barru dan Kabupaten Luwu Utara diberi penguatan kapasitas (teori dan praktek) bagaimana kiat menulis artikel yang akan dimuat di website BaKTI: batukarinfo.com.

Membuka kegiatan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Bappeda provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irawan Bintang menyampaikan bahwa setiap upaya baik yang dilakukan oleh suatu daerah perlu disebarluaskan, agar dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya untuk melakukan strategi dan pendekatan yang



serupa. Salah satu upaya untuk menyebarluaskan pembelajaran itu adalah mempublikasikannya di berbagai media, khususnya di dunia maya.

Disampaikan pula bahwa selama ini bentuk tulisan yang dibuat oleh Staf Pemerintah lebih mengarah kepada bentuk laporan. Sebatas menggugurkan kewajiban untuk melaporkan kegiatan. Padahal, banyak hal baik di lapangan yang bisa diceritakan kepada pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan melalui pelatihan menulis bagi anggota Pokja AMPL menjadi penting, agar semakin banyak orang yang mengetahui dan mengambil pembelajaran.

“Saya atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih atas fasilitasi BaKTI untuk memberi ruang di website batukarinfo.com bagi publikasi kegiatan AMPL Sulawesi Selatan,” apresiasinya. Beliau berharap banyak bahwa aktivitas Pokja AMPL di masing-masing kabupaten dapat dipublikasikan melalui berbagai media yang ada, baik itu melalui bulletin maupun di dunia maya. Banyak kisah sukses dan praktik baik yang perlu disebarluaskan agar makin banyak yang tahu bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa, Kader, Sanitarian dan masyarakat. Pokja AMPL memiliki banyak informasi berharga untuk dibagikan.

Komitmen pada Pertukaran Pengetahuan

BaKTI sebagai organisasi yang berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang

pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, memandang penting untuk memberi ruang bagi Pemerintah yang ingin mempromosikan kegiatannya. Atas dukungan UNICEF, BaKTI memfasilitasi Pokja AMPL di Sulawesi Selatan untuk mempublikasi kegiatannya di Web BaKTI www.batukarinfo.com/wash-sulawesi-selatan.

Website ini adalah portal yang memiliki spesifikasi penyebarluasan data dan informasi terkait pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Sejak dibuat di tahun 2009, sampai saat ini [batukarinfo](http://batukarinfo.com) memiliki 2000-an anggota yang aktif berkontribusi data dan informasi. Anggota yang telah melakukan registrasi, akan memperoleh kesempatan untuk mengakses dokumen –referensi hasil-hasil pembangunan yang diposting oleh pemerintah dan NGO lokal dan International. Tersedia juga update informasi lowongan pekerjaan maupun peluang beasiswa dan penelitian.

Di akhir kegiatan, beberapa peserta sangat mengapresiasi kegiatan ini, dimana pengetahuan dan wawasan mereka semakin meningkat tentang tata cara penulisan artikel dan bagaimana mempublikasikannya. Ke depan, mereka akan memotivasi rekan kerja di instansi masing-masing untuk menulis setiap kegiatan yang telah dilakukan. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, Anda dapat menghubungi kami melalui info@bakti.or.id

Kedaulatan Pangan di Salassae

“

Kami ingin, penduduk di Salassae bangga dengan pertanian alami.

Seperti anak-anak yang membanggakan orang tua

Armin Salassa

Foto : Yusuf Ahmad

Desa Salassae diapit dua aliran sungai besar, luasnya sekitar 10,8 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 4000 jiwa atau sekitar 926 Kepala Keluarga. Desa ini memiliki luas lahan pertanian sawah sekitar 100 ha.

Suasananya sangat menyejukkan. Sawah yang tersusun berundak-undak mengikuti kontur tanah berbukit. Ada aliran sungai dengan air yang jernih, ratusan capung yang terbang berseliweran, burung bangau yang mengendap-ngendap diantara tanaman padi.

Hingga praktik pertanian alami dilaksanakan sejak 2011, sudah 60 persen petaninya beralih meninggalkan pertanian berbahan kimia.

Dimulai dari mengubah pola pikir

Ancaman utama dalam praktik pertanian yang mengandalkan bahan kimiawi adalah dampak dari penggunaan pestisida. Sebagian besar petani di Indonesia bukan hanya di Salassae, melakukan penyemprotan pestisida tanpa menggunakan masker penutup hidung ataupun kaos tangan untuk melindungi kulit dari bahan kimia.

Anak-anak yang sedang bermain di kebun atau di pekarangan rumah berisiko menghirup pestisida yang disemprotkan ke tanaman oleh orangtuanya. Kelompok petani di Salassae sepakat bahwa praktik pertanian menggunakan bahan kimia terbukti berbahaya dan merusak.

Sebelumnya di Salassae, pertanian menggunakan bahan kimia dilakukan semua orang. Penggunaan pupuk dan pestisida ke lahan-lahan persawahan tanpa adanya kontrol. Tahun 1980, warga mulai beralih menanam cengkeh dan karet. Ratusan hektar lahan sawah berubah fungsi. Sementara kebutuhan hidup semakin meningkat, musim panen cengkeh hanya setahun sekali. Atas dasar inilah, sebagian besar warga beralih mencari pekerjaan.

Akhirnya puluhan anak muda yang hanya menamatkan SMA melakukan perjalanan yang panjang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menjadi buruh paruh waktu di perusahaan, ataupun buruh di perkebunan sawit. Dari kebun-kebun sawit inilah, para warga kemudian menemukan racun hama yang dikirimkan ke Salassae.

Racun Malaysia, warga Salassae

menamakannya demikian. Harganya hingga Rp1 juta per dua jerigen. Tingginya penggunaan pestisida inilah yang membuat Armin gelisah. Pada 2011, dengan modal cerita dan pengalaman bekerja sebagai tenaga lapangan di beberapa NGO, ia membuka wacana pada beberapa petani.

Selama enam bulan, Armin dan beberapa petani memulai diskusi. Membangun mimpi secara bersama. Semangat yang menyatukan mimpi mereka berdasar pada kepercayaan bahwa Salassae adalah kampung yang sangat penting, jika Salassae rusak maka bumi akan bocor.

Kembali ke pertanian alami

Lima tahun lalu, seratusan pohon tanaman cabe milik keluarga Abdul Wahid (34 tahun) bertumbuh subur, batangnya kokoh, daunnya lebat dan lebar-lebar, namun tak menghasilkan buah. “Mungkin kelebihan dosis, atau ada yang salah dengan pupuknya,” katanya, sambil mengenang. “Tapi kan kami bangga. Jadi bilang ke orang-orang kalau mau lihat daun cabe paling besar di dunia, itu di Salassae,” tambahnya sembari tertawa.

Tanaman cabe dengan daun terbesar di dunia milik Abdul Wahid adalah uji coba warga di desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, pada awal mereka kembali ke praktik pertanian alami.

“Tanaman cabe kami kelebihan unsur nitrogen. Jadi pertumbuhan daunnya sangat bagus tapi karena kekurangan unsur kalium maka tanaman tidak menguatkan bunga dan buah,” jelas Armin Salassa, inisiator pertanian alami di Salassae.

Ebri, kepala Dusun Bonto Tangnga mulai mencoba pertanian alami pada musim tanam padi awal tahun ini. Ia tidak lagi menggunakan pupuk berbahan kimia di lahannya yang seluas 4 are. Ia menaburi lahannya hanya dengan pupuk kompos. Hingga usia 25 hari, tanaman padinya tumbuh sangat baik.

Namun menjelang musim bunga keluar tiba-tiba tanaman padinya menguning dan rusak. “Saya heran. Saya tanya ke teman-teman, kenapa seperti ini. Rupanya saya kelebihan kompos,” katanya. “Seharusnya saya gunakan 5 karung kompos saja, tapi waktu itu saya pakai kompos sampai 20 sak.” Ebri tidak berkecil hati



Dua ibu sedang mempersiapkan bahan-bahan alami sebagai bagian dari proses pembuatan pupuk organik melalui fermentasi. Nantinya akan digunakan sebagai nutrisi untuk tanah menggantikan pupuk berbahan kimia.

Foto: Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad

apalagi menyerah. “Saya akan coba lagi. Dan akan buktikan kalau saya bisa lebih baik toh,” katanya.

Di Salassae, beralih ke praktik pertanian alami telah merangsang semangat belajar dan berinovasi para petani. Tahmil (41 tahun) seorang petani menyebutnya sebagai proses percobaan. “Kalau semua baik-baik saja, tak ada inovasi nantinya,” katanya.

Mengganti bahan kimia, mengandalkan mikroba

Setiap buah dan tanaman memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Ekstrak buah pepaya bila difermentasi akan menghasilkan unsur kalium. Begitu juga dengan cangkang telur yang disangrai dan difermentasi. Tak hanya itu tulang sapi yang dilarutkan bersama asam cuka pun menghasilkan unsur yang sama. Petani-petani di Salassae belajar mengelola pertanian alami termasuk mengatur 'pola makan' tanaman. Kapan tanaman-tanaman mereka memerlukan nitrogen, fosfor dan kalium. Belajar dari berbagai dokumen yang bisa diperoleh di internet, petani-petani ini mengetahui setiap fase tumbuh tanaman membutuhkan asupan yang berbeda jenis dan kadarnya. Pengetahuan mengenai pola makan, masa tanam dan kecocokan tanam merupakan kearifan lokal yang hidup kembali di Salassae.

Dalam proses pembuatan mikroba, kompos dan nutrisi yang dilakukan secara gotong royong semua bahan-bahannya diperoleh dari lingkungan sekitar, pun dengan gula merahnya. Gula merahnya sendiri diproduksi dengan cara alami di desa Salassae.

Ekstrak buah berfungsi sebagai nutrisi tanaman. Para petani menyemprotkannya dengan campuran air tawar dari sumur. Untuk ukuran tangki 15 liter, penggunaan ekstrak sebanyak tiga sendok makan. Ekstrak buah sebanyak 20 liter bisa dipakai selama dua tahun.

Pertanian alami menopang perekonomian petani

Hasil pertanian alami dan yang menggunakan bahan kimia jauh berbeda. Sebelum Tahmil beralih ke praktik pertanian alami tahun 2013, di sawah seluas 30 are miliknya hanya mampu menghasilkan sekitar 5 karung padi. “Sekarang saya bisa menghasilkan sekitar 800 kilogram atau 7,5 karung,” katanya. Berat padi yang ditanam secara alami pun lebih baik. Satu karung gabah seberat 110 kilogram dapat menghasilkan 90 kilogram beras. Sedangkan untuk berat gabah yang sama dari hasil pertanian kimiawi hanya mampu menghasilkan maksimum 60 kilogram beras.

Perbedaan biaya produksi pada praktik pertanian alami dengan penggunaan bahan

kimia sangat berbeda. Untuk lahan pertanian sawah seluas 1 hektar, biaya produksi untuk persiapan pupuk dan racun pestisida mencapai 4 juta rupiah. Sementara jika menggunakan bahan alami biaya produksinya hanya 300 ribu rupiah. Biaya itu pun hanya untuk membeli kompos dan gula merah.

Dalam memasarkan hasil dari praktik pertanian alami, para petani Salassae membentuk Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS). Mereka juga membuat unit koperasi yang mereka sebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Di LKM ini, hasil produksi pertanian dikumpulkan dan disalurkan melalui jaringan. LKM membeli beras petani seharga Rp11 ribu per kilogram dan memasarkannya dengan harga Rp15 ribu per kilogram.

Kini Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) telah memproduksi pupuk kompos sebanyak 75 ton. Sementara lahan pertanian untuk sawah seluas 30,6 hektar atau sebanyak 73 orang dengan hasil pertanian sebanyak 1,5 ton beras. Pertanian kacang tanah 320 kilogram, sayur mayur seluas 2,5 hektar, kebun sebanyak 200 petani, dan peternakan.

Perubahan yang terjadi

Jayadi seorang petani, yang sedang menaburkan pupuk kompos di lahan sawahnya, memperlihatkan perbandingan kekuatan antara padi alami dan non alami. Pertama, batang padi dengan penggunaan pupuk alami lebih besar dan kokoh. Batangnya seperti memiliki isi dan tidak lembek atau mudah retak saat ditekan. Kedua, akar padi pun lebih panjang.

Di sisi lain, ketahanan akan hama dengan praktik pertanian alami pun lebih baik. Batang-batang padi yang kokoh dan keras tak dapat dimakan tikus dengan cepat.

Saat ini pengembangan pertanian alami sudah mulai disebarkan di 25 desa tetangga dan beberapa kabupaten lainnya di Sulsel. Perubahan pola pikir petani dari pertanian yang mengandalkan bahan kimia ke seratus persen mengandalkan bahan-bahan alami, adalah hal terbesar yang mendasari perubahan perilaku mereka.

Memanfaatkan berbagai pengetahuan yang diperoleh dari internet, petani Salassae melakukan beragam uji coba untuk mendapatkan komposisi terbaik pupuk alami misalnya. Mereka kini lebih menghargai proses

berbagi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman.

Dengan model seperti itu, anggota KSPS telah memahami sistem pertanian alamiah. Dan setiap orang bertanggungjawab, menyebarkan pengetahuan. Kini, dengan pengetahuan setiap anggota, KSPS merencanakan Salassae menjadi kampung pendidikan pertanian. Kini secara perlahan, sawah, kandang peternakan, hingga kebun warga mulai ditata. Membuat pagar dan menanam bunga.

Bukan hanya pola pikir mereka mengalami perubahan, para petani di Salassae juga telah memiliki pengalaman berorganisasi. Masing-masing anggota Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) menjadi fasilitator pertanian. Ismail Tismin (43 tahun) membangun sistem pertanian alamiah di lima desa tetangga, seperti Bonto Bangun, Bonto Haru, Batu Karopa, Pangalloang, dan Borongrappoa.

Transfer ilmu dari seorang petani ke petani lainnya di Salassae dilakukan dengan cara yang unik. Masing-masing anggota baik ibu-ibu maupun bapak-bapak menjadi agen-agen penyebaran informasi mengenai sistem pertanian alami. Mereka diharapkan dapat menularkan informasinya sekecil apapun yang mereka tahu di lingkup sekitar mereka dulu. Tidak masalah apakah yang bisa dipengaruhi itu awalnya satu atau dua saja.

Keberadaan KSPS memberi dampak pada banyak sendi-sendi kehidupan warga di Salassae, tidak hanya terjadi pada budaya bertani. Namun juga terjadi pada dimensi perekonomian dan sosial. Warga Salassae kini kembali bergotong royong, belajar dan melakukan uji coba secara berkelompok dan saling membantu. Perubahan terbesar tentunya terjadi pada lingkungan tempat tinggal mereka yang bebas dari bahan kimia.

“Mimpi kami sederhana, Salassae akan menjadi kampung pendidikan. Jika mau lihat taman yang luas itu di Salassae. Jika ingin lihat sistem pertanian alamiah secara besar itu di Salassae. Jika ingin lihat peternakan yang ramah lingkungan itu di Salassae juga,” kata Armin. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas BaKTI, hubungi info@bakti.or.id

5 PANDUAN



MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Oleh **MANSYUR RAHIM**

Tidak sedikit yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan kriminal, baik itu mulai dari penipuan hingga kejahatan berat semisal pembunuhan. Semoga Panduan Menggunakan Media Sosial ini bisa membantu teman-teman mencegah hal yang tidak kita inginkan. Berikut 5 Panduan Menggunakan Media Sosial yang bisa teman-teman terapkan.

1 Menjaga Privasi

Pernah mendapat surel (e-mail), SMS atau telepon penawaran produk dari orang yang tak kamu kenal? Sekali dua kali tak apa. Tapi jika keseringan, tentulah terasa mengganggu.

"Dia dapat dari mana yah nomer saya?" begitu kadang pikir kita. Iya, kan?

Sebenarnya, tanpa sadar kitalah yang membagikan nama surel dan nomer ponsel kita pada mereka. Yang paling sering kita lakukan adalah memberikan nomer ponsel atau surel di status, kolom komentar atau balasan di salah satu media sosial. Padahal status, kolom komentar atau balasan itu bisa dilihat semua orang yang masuk dalam lingkaran pertemanan kita. Bahkan, mereka yang bukan teman kita

pun bisa jika kita pengaturan privasi kita terbuka untuk umum.

Cara untuk mencegah hal-hal privasi kita tersebar di dunia maya dan disalahgunakan oleh orang lain adalah dengan mengubah aturan privasi ke tertutup atau hanya orang-orang tertentu saja. Atau, jawablah pertanyaan tentang nomer ponsel atau surel melalui jalur chat atau *direct message*.

2 Jaga Keamanan Akun

Kasus peretasan akun email atau media sosial semacam facebook sudah sangat sering terjadi. Modus paling umum adalah para peretas memakai email atau facebook untuk menipu teman-teman atau kenalan si pemilik akun, misalnya dengan

meminta pinjaman uang atau melalui pulsa dengan berbagai alasan. Biasanya, para penipu ini mengaku sedang kena musibah untuk menarik simpati sehingga kita terpedaya.

Cara efektif dalam Panduan Menggunakan Media Sosial untuk mencegah hal ini terjadi adalah membuat password atau kata kunci yang aman sehingga orang lain sulit meretas akun surel atau media sosial kita. Salah satu cara membuat akun-akun kita aman dari peretasan adalah dengan membuat kata-kata kunci yang berbeda untuk setiap akun.

3 Menghindari Hoax

Di era di mana informasi datang bagai tsunami melanda, penting bagi kita untuk menyaring informasi yang masuk agar tidak terjebak masuk ke dalam penyebaran Hoax atau berita bohong. Persebaran hoax ini sangat susah dilawan. Mati satu tumbuh seribu, begitulah kira-kira keberadaan situs-situs penyebar hoax. Ini karena kemudahan membuat blog atau situs berita.

Ada banyak motif dari bermunculannya situs-situs pembuat hoax ini. Mulai dari motif mendapatkan uang dengan memanfaatkan fanatisme atau kebencian orang banyak sampai pada motif politik seperti yang terlihat pada masa-masa menjelang dan paska pilpres 20014. Hal ini terlihat kembali pada pilgub DKI 2017.

Cara mencegah penyebaran hoax, seringkali diikuti dengan benih kebencian dan perpecahan, adalah dengan mulai dari diri sendiri. Jangan ikut menyebarkannya. Biasakan melakukan verifikasi atau tabayyun sebelum ikut menyebarkan sebuah informasi.

4 Sebarkan hal Positif, Jangan yang Negatif

Masih ingat kasus Florence? Seorang perempuan yang mengeluh di Path kemudian menjadi ramai di media sosial. Kasus Florence bahkan berakhir di pengadilan karena warga Yogyakarta tak terima dengan pernyataannya di media sosial. Padahal, Florence menuliskannya di Path, media sosial yang membatasi jumlah pertemanan penggunaanya hanya sebanyak 500 orang.

Belajar dari kasus Florence, sebaiknya gunakan media sosial itu menyebarkan hal-hal positif dan hindari sebaliknya. Jauhkan gawai

atau ponsel jika sedang amarah untuk menghindari membuat status yang bisa jadi boomerang seperti yang dialami Florence. Jika punya keluhan, kekecewaan atau kemarahan, tuliskan dengan nada yang lebih berisi masukan, kritikan atau saran, bukan cacian atau hinaan.

Terlebih saat ini manajer-manajer personalia atau orang-orang yang menentukan dalam perekrutan karyawan sebuah perusahaan menggunakan media sosial untuk mencari tahu calon pekerja. Mereka akan dengan gampang mengetahui bagaimana sikap, watak atau kepribadian seseorang melalui media sosial yang bersangkutan. Tentu saja para bos itu ingin memastikan mereka menerima orang yang baik dari segi, intelegensi, emosi, sosial dan aspek-aspek lainnya.

Jangan sampai kesempatan bekerja di tempat idaman kita gagal hanya karena status-status bernada negatif di media sosial kita.

5 Gunakan Seperlunya

Gunakan media sosial seperlunya saja. Tak perlu memiliki akun pada semua media sosial yang ada sekarang. Gunakanlah media sosial yang paling menunjang aktifitasmu. Saya sendiri, sebagai blogger, hanya menggunakan media sosial yang saya anggap bisa membantu menyebarkan tautan ke tulisan-tulisan di blog. Mengikuti dan aktif di semua media sosial akan menghambat produktivitas dan akan berdampak pada tidak terkontrolnya antara akun satu dengan akun lainnya. Terlalu banyak akun media sosial juga bisa menciptakan ketergantungan. Waktumu akan habis tersita hanya untuk mengurus akun-akun itu padahal tak semuanya kamu perlukan.

5 Panduan Menggunakan Media Sosial di atas hanyalah rangkuman dari beberapa tips dan trik. Masih banyak cara lain untuk mengoptimalkan media sosial. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini juga dapat dibaca pada blog Lelaki Bugis di link berikut <http://lelakibugis.net/5-panduan-menggunakan-media-sosial/>

Artikel

Rasio Elektrifikasi Terus Ditambah, Dana Subsidi untuk Listrik Desa

Penghematan subsidi listrik sebagai dampak pencabutan subsidi bagi sebagian pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere diusulkan untuk membiayai infrastruktur ketenagalistrikan. Penghematan itu diusulkan untuk membiayai program listrik desa. Alokasi subsidi listrik tahun ini sekitar Rp 44 triliun, sedangkan realisasi subsidi tahun 2016 sekitar Rp 60 triliun.

Direktur Institute for Essential Services Reform FabbyTumiwa mengatakan, penghematan subsidi bisa dialokasikan untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Di wilayah itu, rasio elektrifikasi masih rendah. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk.

"Selain rumahtangga yang ada di daerah terpencil, golongan rumah tangga miskin yang belum menikmati aliran listrik juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Dengan penghematan subsidi itu, akses terhadap listrik bagi golongan keluarga tersebut bisa ditingkatkan," kata Fabby, Selasa (3/1), di Jakarta.

<http://www.batukarinfo.com/news/rasio-elektrifikasi-terus-ditambah-dana-subsidi-untuk-listrik-des>

Tarif Listrik Murah Bisa Direalisasikan

Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyatakan perlu syarat tertentu agar harga jual listrik dari energi terbarukan di Indonesia menjadi lebih murah. Namun, untuk menjadi harga yang lebih murah dari harga jual listrik tenaga batu bara masih perlu waktu.

Menurut Fabby, ada sejumlah faktor dasar yang berpengaruh terhadap harga jual listrik energi terbarukan. Faktor tersebut, antara lain, skala proyek pembangkit, ongkos teknologi, cara lelang, dan pendanaan. Skala proyek pembangkit listrik energi terbarukan berukuran besar, misalnya sampai ratusan megawatt (MW), harga jual ke konsumen berpotensi lebih murah dibandingkan skala proyek yang kecil.

<http://www.batukarinfo.com/news/tarif-listrik-murah-bisa-direalisasikan>

Referensi



Kanoppi Information Sheet

Kerjasama World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) di bidang penelitian agroforestri kembali terjal. Setelah lebih dari tiga tahun berjalan, melalui Kiprah Agroforestri edisi khusus Kanoppi, berbagai temuan penelitian disebarluaskan dengan bahasa yang lebih populer agar bisa diterima dengan baik oleh pembaca. <http://www.batukarinfo.com/referensi/kanoppi-information-sheet>



Buku Saku Gender Islam dan Budaya

Secara khusus, "Buku Saku Gender, Islam dan Budaya" ini diterbitkan sebagai dukungan program Supporting Islamic Leadership (SILE) terhadap isu-isu pendidikan demokrasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. SILE adalah program kerjasama antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Kanada. Secara khusus, program ini bertujuan mendukung dan menguatkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinan lokal muslim Indonesia. Di Indonesia, program ini dilaksanakan oleh dua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Alaudin Makasar selama 2011-2016. <http://www.batukarinfo.com/referensi/buku-saku-gender-islam-dan-budaya>



Kegiatan di BaKTI



13 Januari 2017

Diskusi Publik : Indeks Kepercayaan Publik Kota Makassar

Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orwil Sulsel bekerjasama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar melaksanakan diskusi publik dengan tema “Indeks Kepercayaan Publik Kota Makassar”. Kegiatan ini mendiskusikan hasil studi LSKP tentang Indeks Kepercayaan Politik Makassar. Diskusi ini melibatkan

tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta organisasi pemuda dan masyarakat dengan menghadirkan pembicara Andi Ahmad Yani, Peneliti LSKP sekaligus Dosen FISIP Unhas dan Alwi Rahman, Budayawan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami kualitas kepercayaan politik masyarakat Makassar, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kepercayaan politik, mendiskusikan dampak kualitas kepercayaan politik pada kondisi sosial masyarakat Makassar pada tahun 2017. Andi Yani menjelaskan bahwa modal sosial merupakan salah satu elemen dasar dalam bangunan masyarakat sipil.

Sebagai sebuah nilai, kepercayaan yang diakui dan terpatrit dalam hati nurani sebagian besar anggota masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan sebuah komunitas masyarakat. Kepercayaan adalah bahan dasar dalam menjamin legitimasi dan keberlanjutan sistem demokrasi. Kepercayaan menjadi sangat penting terutama di negara demokrasi yang muncul, seperti halnya Indonesia. Hasil penelitian LSKP mengungkapkan bahwa masyarakat Makassar percaya kepada lembaga hukum seperti pengadilan, jaksa dan kepolisian, begitupun pada institusi pemerintah pada level pusat, provinsi dan kota Makassar. Berbeda halnya dengan institusi legislative dan parpol dimana masyarakat Makassar kurang percaya pada lembaga tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang berasal dari LSM, OMS, Akademisi dan media.

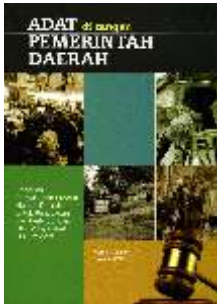
21 Januari 2017

Seminar “Tips dan Strategi Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris dan TOEFL”

Bahasa Inggris sering kali menjadi halangan bagi beberapa orang untuk mendaftar pekerjaan atau pun beasiswa. Terlebih sebab hampir seluruh beasiswa mensyaratkan skor TOEFL tertentu. Menyadari pentingnya kebutuhan Bahasa Inggris yang makin tak terelakkan, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tellulimpoe Sinjai mengeliat kegiatan terkait tips dan strategi meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan TOEFL. Hadir sebagai pemateri adalah Rizkayadi, M.Sc dan Muhammad Ahkam Arifin, M.Sc.TESOL. Rizkayadi yang merupakan alumni Groningen University Belanda lewat skema beasiswa STUNED membawakan materi “Tips dan Strategi Meningkatkan Skor TOEFL”. Rizkayadi memaparkan beberapa pemahaman mendasar dan tips-tips menjawab soal-soal TOEFL yang kerap menjadi momok bagi mahasiswa. Sementara M. Ahkam



Arifin, alumni The University of Edinburgh, United Kingdom yang mempresentasikan “Tips dan Strategi Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris”. Keduanya menekankan peran vocabulary sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum bertempur dengan soal-soal TOEFL. Meski ILUSI adalah organisasi alumni SMA Negeri 1 Tellulimpoe Sinjai namun kegiatan ini diikuti pula oleh peserta dari nonalumni dengan jumlah sebanyak 18 orang.



Adat di Tangan Pemerintah Daerah

PENULIS Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat adalah tanggung jawab konstitusional Pemerintah dan pemerintah Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, penetapan tanah ulayat dan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat adalah urusan wajib Pemerintah Daerah. Namun tidak mudah melakukan pengukuhan Masyarakat Adat. Buku ini membagikan pengetahuan ihwal Masyarakat Hukum Adat. Argumentasi teoritis dan hukum yang penting dipahami dalam perumusan produk hukum daerah ada di dalamnya. Selain itu, langkah-langkah dan dokumen teknis juga disediakan untuk mendorong inspirasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkeadilan.



Bintang Kecil Dalam Kotak Ajaib

PENULIS Rusdin Tompo

Buku ini berisi kumpulan esai, utamanya esai mengenai anak-anak yang dihadirkan dan ditampilkan tak ubahnya produk yang dikomodifikasi. Ukurannya seberapa laku anak-anak itu mampu mendatangkan iklan dan pundi-pundi rupiah bagi media penyiaran yang bersangkutan. Hitung-hitungannya tetap pada nilai komersial anak dalam program. Ini semacam hukum besi ketika media penyiaran dimaknai semata-mata sebagai industri dengan hitung-hitungan ekonomi. Fenomena ajang pencarian bakat merupakan contohnya. Ajang serupa ini memang berhasil menjadikan anak-anak sebagai bintang-bintang televisi, tapi berapa dari program-program itu sarat dengan muatan pendidikan?



Bencana Industri

PENULIS Heru Prasetya, dkk

Dibanding peristiwa lain, bencana adalah yang paling tajam dalam mengungkapkan struktur sosial dan budaya masyarakat kita. Bencana bisa tiba-tiba datang membeberkan dengan terang benderang kegagalan organisasi, regulasi, dan sistem politik yang ada. Bencana memberi kemungkinan dan peluang untuk mengamati aspek-aspek dalam proses dan struktur sosial yang tersembunyi dan tidak tampak dalam keseharian. Karena itu, mengamati lumpur Lapindo juga akan membuka jalan pada pemahaman kita atas struktur sosial yang lebih luas. Telaah atas berbagai aspek menyangkut lumpur Lapindo bisa membawa kita pada pemahaman baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara. Penulisan buku ini berangkat dari pijakan seperti itu.



Tradisi Lisan Sebagai Sejarah

PENULIS Jan Vansina

Menurut Francis West dari Australian national University, paling tidak ada tiga hal penting yang dilakukan oleh Jan Vansina dalam buku ini. Pertama, mendefinisikan dan mengkategorikan bukti lisan sebagai sumber sejarah, sekaligus memberikan cara agar dapat digunakan untuk menulis sejarah. Kedua, membahas hubungan praktis antara ilmu sejarah, antropologi sosial, dan ilmu-ilmu relevan lainnya yang bermanfaat untuk mengumpulkan testimoni lisan. Ketiga, menyiapkan justifikasi teoritis atas koleksi dan penggunaan bukti-bukti lisan dalam penulisan sejarah. Tiga hal yang kemudian menempatkan karya ini, dinobatkan sebagai buku pertama yang melakukan kajian secara sistematis terhadap persoalan seputar penulisan sejarah masyarakat yang berada di luar tradisi tertulis.